

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TIM FORUM
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HASMIAH

NIM. 500647129

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

Hasmiah
(mhiarazak@gmail.com)

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*deep interview*) dan studi dokumentasi. Faktor pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, yaitu: (1) Tersedianya sumberdaya manusia di dalam tim forum kabupaten sehat yang berasal dari berbagai golongan dan tingkat pendidikan dari berbagai jenjang; (2) Adanya pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat; (3) Adanya dukungan dana dan program dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat, yaitu: (1) Belum tersedianya kantor Sekretariat Forum Komunikasi Desa (FKD) tingkat Kecamatan dan Pokja di tingkat Desa/Kelurahan, yang dapat mendukung bekerjanya pengurus dan tempat pertemuan masyarakat untuk mendiskusikan ide dan langkah yang akan diambil dalam mensukseskan gerakan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan; (2) Letak geografis kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan yang sulit dijangkau sehingga pelaksanaan sosialisasi tentang gerakan kabupaten sehat kurang menyebabkan partisipasi dan inisiatif masyarakat terbatas (3) belum forkusnya pembinaan yang dilakukan oleh tim forum kabupaten sehat terhadap kegiatan yang ada di lapangan, seperti pembinaan terhadap pasar, sehingga penataan dan kebersihan pasar masih kurang; (4) Masih sulitnya untuk merubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan melibatkan dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong setiap jumat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan lancar, hal ini ditandai pada proses implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat yang meliputi isi kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci :Tim Forum Kabupaten Sehat

Policy Implementation of Healthy Regency Forum Team in Nunukan District

Hasmiah

(mhiarazak@gmail.com)

Post Graduate Program of Terbuka University

Abstract

This study aims to describe and analyze policy implementation of healthy district forum teams in Nunukan District and identify and analyze the inhibiting and supporting factors of policy implementation on healthy district forum teams in Nunukan District. This research uses qualitative approach with descriptive method. Data collection was done by deep interview and study documentation. There are factors supporting the implementation of policy on healthy district forum teams in Nunukan District, among others: (1) The availability of human resources within the healthy district forum teams from various groups and levels of education from various levels; (2) There is general guidance in the implementation of healthy district forum activities; (3) The existence of funding support and programs from the government. While the inhibiting factors are: 1) The unavailability of the office of the Village Communication Forum Secretariat at the sub-district level and working groups at the village level, which can support the operation of the board and community meeting places to discuss ideas and steps to be taken in the success of the healthy district movement in Nunukan District; (2) The geographical location of sub-districts in Nunukan is difficult to reach so that the implementation of the socialization of the healthy district movement is less likely to lead to the participation and limited community initiative; (3) The coaching did by healthy district forum teams on existing activities in the field has not been much focused yet, such as market guidance, so that market structuring and hygiene are lacking; (4) It is still difficult to change people's behavior, especially in terms of maintaining environmental hygiene and volunteering in community services in every Friday. The result of the research shows that the implementation of policy about healthy district team in Nunukan District has not been running smoothly, it is indicated in the implementation of policy of healthy district forum teams which covering the policy content, activity implementation and reporting has not been running well.

Keywords: *Healthy Regency Forum Team*

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 16 Oktober 2017
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
9699FAEF427248325
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Hasmiah
NIM. 500647129

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Hasmiah

NIM : 500647129

Program Studi : Magister Administrasi Publik

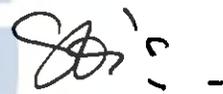
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Nopember 2017

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M. S
 NIP. 195308271979031002


Prof. Dr. Sri. Suwitri, M.Si
 NIP. 196214 198703 2 001

Penguji Ahli

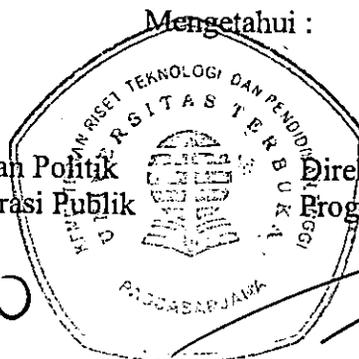

Prof. Dr. Aries Djaenuri, M. A
 NIP. 19470401 196805 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik
 Program Magister Administrasi Publik

Direktur
 Program Pascasarjana







Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 195910271986031003

Dr. Liestyodono
 NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hasmiah
 NIM : 500647129
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/10 Nopember 2017

Waktu : 15.30 – 16.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Ali Muktiyanto, S.E, M.Si

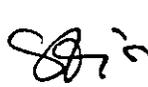
Tandatangan



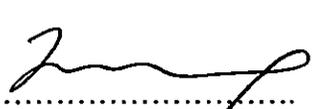
Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M. A



Pembimbing I
 Nama : Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si



Pembimbing II
 Nama : Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.S



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul: Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan. Penyusunan TAPM ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana (PPs) dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Pemilihan judul Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan, penulis maksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan.

Penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. DR. Sri Suwitri, M.Si dan DR. Ir. Soesilo Wibowo, MS selaku dosen pembimbing 1 dan II yang telah mengarahkan dan mengoreksi dengan teliti sehingga penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dapat selesai dengan baik;
2. Bupati Nunukan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

atas berkenannya memberikan dukungan dan data internal dinas yang ada hubungannya dengan TAPM ini;

4. Pengurus Forum Kabupaten Sehat (FORKAHAT) yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan respon dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan;
5. Ibunda tercinta atas dukungan, semangat dan motivasi serta dengan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis;
6. Suamiku tercinta "Alim Bakhri, S.Pt. M.AP" dan putraku tersayang "Muhammad Akbar Alim" yang telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan moral maupun materil selama menjalani pendidikan ini;
7. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;
8. Seluruh teman-teman, atas bantuannya kepada penulis selama proses penyusunan TAPM;
9. Seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
10. Teman-teman Pokjar Nunukan atas segala bantuannya selama ini;

Akhirnya penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini dapat membawa manfaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Nunukan, 16 Oktober 2017

Penulis

Hasmiah
NIM 500647129

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hasmiah
 NIM : 500647129
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir: Polman, 30 Desember 1972

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di Polman pada Tahun 1984
2. Lulus SMP di Polman pada Tahun 1987
3. Lulus SMA di Makassar pada Tahun 1990
4. Lulus S1 di Makassar pada Tahun 1997

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2006 s/d 2008, sebagai staf pelaksana di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan;
2. Tahun 2008 s/d 2010, sebagai staf pelaksana di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Tahun 2010 s/d 2012, sebagai Plt. Kepala Subbid SDM dan Kebudayaan di BAPPEDA Kabupaten Nunukan;
4. Tahun 2012 s/d 2014, sebagai Kepala Subbid SDM dan Kebudayaan di BAPPEDA Kabupaten Nunukan;
5. Tahun 2014 s/d 2017, sebagai Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian di BAPPEDA Kabupaten Nunukan;
6. Tahun 2017 – sampai sekarang, sebagai Kepala Subbid. PDU dan Ekonomi Kreatif di BAPPEDA Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 16 Oktober 2017

Hasmiah
 NIM. 500647129

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir	37
D. Operasionalisasi Konsep.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	41
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Hasil Penelitian.....	67
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	126
-----------------------	-----

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Matriks Hasil Wawancara Dari Informan

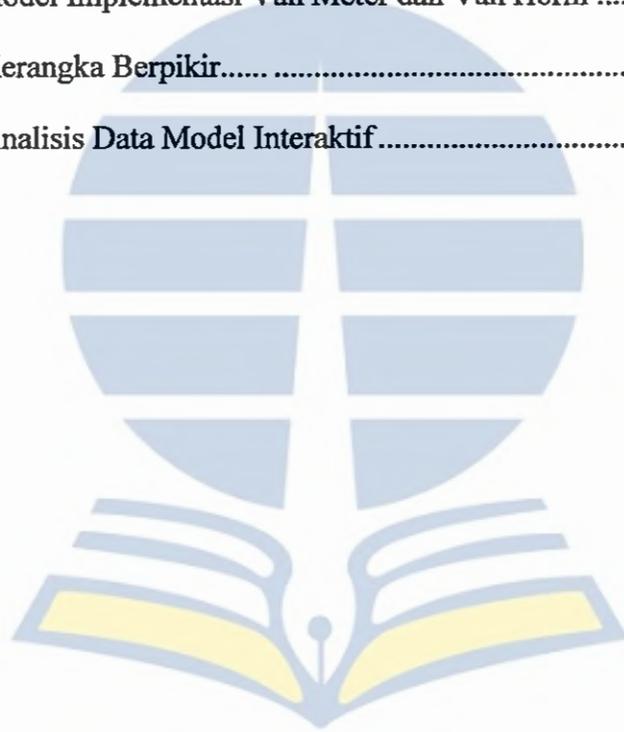
Lampiran 3 Dokumentasi Kondisi lingkungan Pemukiman, Sungai, Pasar

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Forkahat



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
Gambar 2.1	Skema Proses Implementasi Kebijakan	19
Gambar 2.2	Model Implementasi George Edward III	24
Gambar 2.3	Model Implementasi M.S Grindle	26
Gambar 2.4	Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	29
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif.....	48



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1.1.	Penemuan Kasus Pneumonia/ISPA di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2014.....	7
Tabel 4.1	Daftar Nama Anggota Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan	94



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan	124
Lampiran 2.	Matriks Hasil Wawancara dari Informan	128
Lampiran 3.	Foto Kondisi lingkungan Pemukiman, Sungai, Pasar.....	135
Lampiran 6.	Foto Pelaksanaan Kegiatan Forkahat	139



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama secara teoritik, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum (LAN, 2007), yaitu :

- a. *Fungsi pelayanan*, yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan di mana berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, yaitu memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
- b. *Fungsi pembangunan*, yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan dimana fungsinya menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan. Selain itu fungsi pokoknya adalah *development function*/fungsi pembangunan dan *adaptive function*/fungsi adaptasi.
- c. *Fungsi pemerintahan umum*, fungsi ini berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), di mana termasuk di dalamnya untuk menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*).

Tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah selama ini umumnya dianggap masih kurang terutamakerja aparat masih belum memuaskan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya

pengaduan atau keluhan dari masyarakat yang ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), antara lain menyangkut prosedur dan mekanisme pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, serta terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mengacu pada fungsi pelayanan, maka kebijakan pemerintah tentang pembangunan kesehatan merupakan upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan perkataan lain bahwa masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku dalam pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang di perdesaan maupun perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan walau dalam skala minimal. Banyak hal yang menjadi penyebabnya antara lain faktor geografi,

ekonomi, sosial dan teknis. Sementara itu, pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat menimbulkan permasalahan seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminalitas, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang. Hal itu mengakibatkan kualitas lingkungan berpotensi cenderung menurun. Jika hal tersebut tidak segera dikendalikan, maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat. Melalui ini setiap rumah tangga diberdayakan agar tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan yang sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Setiap rumah tangga juga digerakkan untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam hal ini program Lingkungan Sehat, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang "Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat". Pada program ini mencoba untuk mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga dapat sinkron

dan menjelma menjadi daya dorong yang besar terhadap kriteria sehat pada segala sektor dan bidang.

Dengan diterbitkannya peraturan bersama tersebut, maka muncullah ide bahwa untuk mencapai kabupaten/kota yang sehat, maka perlu dibentuk forum komunikasi yang *levelnya* mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai ke *level* forum komunikasi tingkat kelurahan dan desa. Hal ini bertujuan agar tercapai kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya, serta dapat terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana produktivitas perekonomian masyarakat. Suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat tentunya merupakan sesuatu yang layak bagi semua penduduk untuk dihuni dan akan dapat terwujud apabila masyarakat dapat mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah atau daerah bersangkutan.

Kabupaten/kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Penyelenggaraannya dicapai melalui penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/kota Sehat, melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi. Forum Kabupaten/kota Sehat berperan untuk menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang

mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

Oleh karena itulah, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat adalah bersifat terpadu dengan melibatkan berbagai sektor dan elemen masyarakat serta merupakan program unggulan kabupaten bersangkutan, sehingga perlu diciptakan pemukiman sehat dan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri disetiap kecamatan. Program kabupaten sehat bukan hanya tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Kesehatan, akan tetapi telah menjadi tanggungjawab seluruh *stakeholder* yang ada di kabupaten/kota bersangkutan yang dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan program ini harus ada sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga terjalin hubungan kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang berbasis masyarakat guna mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian.

Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam hal ini program Lingkungan Sehat, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mencanangkan/mengumumkan dan membentuk Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat (FORKAHAT) yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta membentuk pengurus Forum Kabupaten Sehat (Forkahat) di tingkat kabupaten, Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan Pokja di tingkat kelurahan/desa sejak Tahun 2012. Forum Kabupaten Sehat di tingkat kabupaten (Forkahat) ketuanya dari unsur masyarakat dan anggotanya terdiri atas

unsur swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, pemuda dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Demikian pula Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan Pokja di tingkat kelurahan/desa. Tujuan dari pembentukan forum tersebut agar Kabupaten Nunukan terwujud sebagai kabupaten sehat.

Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat terdapat 9 tatanan yang disebut tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, yang terdiri atas : kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi; kawasan pertambangan sehat; kawasan hutan sehat; kawasan industri dan perkantoran sehat; kawasan pariwisata sehat; ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, kehidupan sosial yang sehat.

Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum yang sehat merupakan salah satu tatanan utama bagi pengembangan penilaian kabupaten sehat di Indonesia. Tatanan ini berkaitan dengan beberapa aspek seperti; lingkungan sosial dan kesehatan diantaranya udara bersih, air sungai bersih penyediaan air bersih individu dan umum, pengelolaan sampah, pertamanan dan hutan kota, dan pengelolaan pasar.

Dalam upaya menjaga udara bersih, pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan kebijakan dalam hal pengelolaan udara mulai dari proses pengawasan emisi, kendaraan bermotor yang memenuhi syarat, penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat, menurunkan kasus gangguan pernapasan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penurunan kasus Tuberculosis (TB) paru, yaitu

penyakit pernapasan lain yang berpotensi wabah dengan merencanakan program unggulan bagaimana kesiap siagaan dan respon terhadap pandemi influenza. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan pemantauan penyakit seperti penyakit ISPA dan TB Paru. Cakupan penyakit ISPA yang ditangani di Puskesmas sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penemuan Kasus Pneumonia/ISPA Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2014

No.	Tahun	Jumlah Balita		Pneumonia Pada Balita							
				Jumlah Perkiraan Penderita		Penderita Ditemukan dan Ditangani					
		L	P	L	P	L		P		L+P	
						Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2010	7.337	6.523	732	652	74	10,1	34	5,2	108	7,80
2	2011	6.501	6.410	640	650	33	5,2	20	3,1	53	4,11
3	2012	7.304	7.105	740	700	91	12,3	55	7,9	146	10,14
4	2013	8.324	7.525	843	742	101	12,0	58	7,8	159	10,03
5	2014	9.403	8.211	940	821	99	10,5	54	6,6	153	8,69
Jumlah		38.869	35.774	3.895	3.565	398	50,1	221	30,5	619	40,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pada Tahun 2010 jumlah perkiraan penderita Pneumonia pada balita ditemukan 1.384 dan ditangani sebanyak 108. Pada Tahun 2011 mengalami penurunan, yaitu jumlah perkiraan 1.290 dan ditangani sebanyak 53 orang. Kemudian pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 jumlah perkiraan penderita Pneumonia dan yang ditangani semakin meningkat. Berdasarkan data tersebut dapat mengindikasikan bahwa pencemaran udara terutama yang disebabkan oleh kendaraan dan pabrik-pabrik industri masih belum diatasi ini disebabkan belum adanya peraturan berupa Surat

Keputusan yang dikeluarkan Bupati Nunukan yang mendukung program udara bersih, terutama tentang uji emisi kendaraan roda empat dan uji emisi udara tidak bergerak.

Kawasan Sarana Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi, merupakan tatanan kabupaten sehat yang kedua yang didalamnya membahas masalah pelayanan transportasi dan lalu lintas. Di Kabupaten Nunukan masalah pelayanan transportasi dan lalu lintas belum serumit di daerah perkotaan, namun tetap menjadi perhatian karena masalah transportasi berkaitan dengan kemacetan, polusi, stres bahkan dapat menimbulkan masalah sosial. Di Kabupaten Nunukan fasilitas yang disediakan untuk pejalan kaki yang layak sudah ada, namun belum ada pengaturan jalur khusus bagi kendaraan umum, pribadi, motor, sepeda dan pejalan kaki. Selain itu penyediaan terminal oleh pemerintah sudah dilaksanakan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para sopir angkutan umum. Selain itu kondisi terminal yang belum bersih di mana masih adanya toilet yang rusak, air tidak lancar dan arus listrik yang terbatas.

Kawasan pariwisata sehat merupakan tatanan kabupaten sehat yang ke tiga yang membahas tentang informasi wisata dan kesehatan, sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, pelayanan kesehatan dan sarana penunjang bagi wisatawan. Dalam kaitan dengan pariwisata sehat yang mendukung kabupaten sehat terdapat kondisi eksisting yang perlu mendapat perhatian, dari berbagai sektor, seperti sarana kesehatan bagi wisatawan belum diinformasikan secara meluas. Belum ada jaminan asuransi bagi wisatawan yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pemerintah daerah atau dinas kesehatan, belum adanya tanggap darurat atau balai

keselamatan di daerah wisata yang dapat ditunjukkan dengan *Standard Operating Procedur* (SOP), penyebaran informasi tentang objek wisata di tempat umum, misalnya di hotel, bandara/pelabuhan belum dilaksanakan.

Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat merupakan tatanan kabupaten sehat yang keempat yang mencakup lingkungan fisik industri, kantor dan perdagangan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja, terutama kondisi eksistensi yang dipandang perlu ditingkatkan terutama kualitas kawasan industri dan perkantoran sehat, seperti lokasi khusus industri atau kawasan industri belum tersedia, fasilitas ruang kusus merokok di lingkungan perkantoran belum tersedia di semua kantor, hanya ada beberapa kantor, antara lain, Bappeda, Dinas Kesehatan, meskipun telah tersedia media informasi visual seperti stiker yang ditempelkan atau himbauan tertulis untuk tidak merokok di tempat kerja. Demikian pula jaminan kesehatan bagi pekerja ada pada sebagian industri.

Kawasan Pertambangan Sehat, meliputi lingkungan pertambangan, dan lokasi eks pertambangan. Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, seperti pertambangan. Pengelolaan tambang yang tidak sehat tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan dan lingkungan tetapi juga di dalamnya adalah aspek sosial secara keseluruhan. Meskipun indikator kawasan pertambangan sehat relative sederhana secara kuantitatif, misalnya tersedianya jaminan kesehatan bagi penambang/pekerja, namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, seperti masih terdapat kerusakan lingkungan akibat tambang tetapi aspek ini sudah mulai dikelola. Belum semua penambang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

terutama tambang golongan C walaupun sudah adanya peraturan yang mewajibkan penggunaan APD sehingga masih terdapat kasus kecelakaan tambang.

Kawasan Hutan Sehat menjadi salah satu indikator dan tatanan dalam penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia saat ini. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Kalimantan Utara yang kaya dengan sumberdaya hutan, baik hutan alami maupun hutan buatan. Hutan alami dapat punah jika tidak dikelola dengan baik, sedangkan hutan buatan dapat berjalan secara maksimal jika pemerintah, swasta dan masyarakat mempunyai kemauan politik kuat untuk mewujudkannya.

Ada beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan kawasan hutan sehat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan, seperti masih maraknya praktik *illegal logging*/penebangan hutan secara liar di Kabupaten Nunukan, akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan serta adanya keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) terutama pengawas hutan.

Ketahanan Pangan dan Gizi mempunyai pengertian ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan status gizi dan jumlah produksi tanaman bahkan juga mencakup fungsi lembaga koperasi di wilayah tersebut. Di Kabupten Nunukan telah dibangun 15 lumbung padi yang mudah diakses masyarakat. Namun yang masih dianggap kurang karena lembaga distribusi misalnya kelompok dan tani dan koperasi belum berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan, walaupun koperasi secara kelembagaan telah ada tetapi belum berfungsi secara maksimal.

Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri merupakan salah satu tanaman paling penting dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia. Tatanan ini bahkan menjadi salah satu tatanan utama dari 9 tatanan yang ditetapkan dalam Peraturan. Tatanan ini banyak berkaitan dengan sektor kesehatan. Dalam tatanan ini ada 39 indikator pertanyaan yang dapat menginformasikan mengenai kondisi eksistensi yang telah dicapai dengan kondisi eksistensi yang masih perlu mendapat perhatian ke depan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat. Hal-hal yang masih perlu diperhatikan antara lain ; adanya gerakan olah raga rutin yang dilakukan dikalangan masyarakat atau perkantoran, biasanya dilakukan pada hari Jumat, namun tidak secara rutin. Belum adanya kelompok atau organisasi masyarakat yang bergerak secara maksimal dalam penanggulangan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAFZA). Belum adanya kepatutan masyarakat untuk tidak merokok pada tempat-tempat umum, meskipun sudah ada gerakan anti merokok oleh pemerintah. Harapannya adalah bahwa untk mencapai hasil yang optimal, gerakan anti merokok oleh masyarakat menjadi sebuah keharusan. Fasilitas untuk orang cacat di tempat umum belum tersedia. Hal ini mungkin disebabkan karena jumlah orang cacat di Kabupaten Nunukan sangat sedikit. Data yang ada hanya tercatat 1 (satu) orang yang mengalami kecacatan, dan orang ini biasanya beroperasi sebagai anak jalanan/peminta-minta. Belum tersedianya fasilitas pelayanan konseling oleh remaja. Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) masih relatif rendah disebabkan tidak aktifnya tim penggerak UKS Kabupaten yang diketuai oleh Dinas Pendidikan..

Namun demikian, terlihat bahwa pelaksanaan program Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan belum berjalan secara optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten (pembina dan pengurus forkahat) maupun di tingkat kecamatan (Forum Komunikasi Desa) dan di tingkat kelurahan/desa (Pokja) belum dapat bekerja secara optimal.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh tim Forum Kabupaten Sehat tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program kabupaten sehat, terutama dalam menjalankan masing-masing program yang telah ditetapkan serta menemukan solusi yang efektif untuk diterapkan sehingga dapat mendorong kinerja seluruh tim dalam menjalankan program kegiatan secara terpadu. Dengan berjalannya program tersebut dapat diperoleh hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan yang dapat mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Kabupaten Sehat di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat sesuai dengan isi kebijakan di Kabupaten Nunukan?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat dengan isi kebijakan di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, yaitu dapat memberikan masukan/*input* untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya Bupati Nunukan dalam pengambilan kebijakan tentang penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan.
2. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi masalah implementasi kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep kebijakan publik

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Menurut Friedrich (dalam Agustino, 2014) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana dalam kelompok tersebut terdapat hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan), di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasihambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Walaupun maksud dari kebijakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan, namun pemerintah tidak selalu mudah untuk melihat, namun pendapat bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud, merupakan bagian penting dari pengertian kebijakan. Oleh karena itu kebijakan harus menunjukkan apa yang semestinya dikerjakan dan apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita

gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Anderson (dalam Islamy, 2000:30) merumuskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dan kebijakan publik itu menurut Anderson(dalam Islamy, 2000:30) adalah : a) kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; b) kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; c) kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; d) kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; e) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Islamy (1998:102) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada Tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dunn (dalam Wibawa, 1994:50) adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Disamping itu kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*), yaitu arah tindakan aktual atau potensi dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat.

Santoso (dalam Winarno, 2007:19) mengkomparasi *definisi* yang dikemukakan oleh beberapa ahli sehingga definisi kebijakan publik dikategorikan menjadi: pertama, menyamakan kebijakan sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, memandang kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencapai tujuan dan mengatasi masalah atau persoalan tertentu, sedangkan kebijakan tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Sehat adalah suatu

kebijakan yang dibuat pemerintah untuk upaya mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan.

Sifat kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Agustino (2014) dan Winarno (2008:19-20) merupakan bagian dari suatu kegiatan yang dapat dimengerti secara baik bila dibagi dalam beberapa kategori, antara lain :

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik, tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.
- b. Keputusan kebijakan (*police decision*) adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif atau membuat interpretasi hukum yang penting.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan, seperti ketetapan legislatif, dekrit dan pemerintah eksekutif, peraturan administratif, keputusan pengadilan dan sebagainya.
- d. Hasil kebijakan (*policy output*) adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik atau suatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan bermakna apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Akibat dari kebijakan (*policy outcome*) adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan yang berasal dari apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan dari pemerintah, dimana hal ini menyangkut penciptaan

sistem pelaksanaan kebijakan yang merupakan alat khusus untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Proses penerapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran bersifat umum dan telah terinci dengan baik, karena kebijakan publik merupakan pernyataan tujuan secara luas yang nantinya akan diterapkan dan ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Agustino (2014), beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan :
 - 1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
 - 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 - 3) Adanya sanksi hukum
 - 4) Adanya kepentingan publik
 - 5) Adanya kepentingan pribadi
 - 6) Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 - 1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
 - 2) Tidak adanya kepastian hukum
 - 3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 - 4) Adanya konsep ketidak patuhan selektuf terhadap hukum.

2. Konsep implementasi

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan salah satu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan dari turunan kebijakan tersebut. Untuk mengamati rangkaian implementasi kebijakan dapat dimulai dari program lalu ke proyek kemudian kekegiatan yang dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Rangkaian proses implementasi kebijakan selanjutnya menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa, 1994:26) dapat terlihat dalam skema pada Gambar.



Sumber : Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa, 1994:26)

Gambar 2.1 Skema Proses Implementasi Kebijakan

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran memenuhi *output* kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi mencakup beberapa tindakan antara lain : a) Badan-badan pelaksana yang diberi tugas oleh undang-undang dengan tanggungjawab, yaitu dalam menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan supaya implementasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Sumber-sumber ini terdiri atas, personil, peralatan, lahan tanah,

bahan mentah dan uang. b) Badan-badan pelaksana wajib mengembangkan bahasa anggaran dasar untuk menjadi arahan yang konkret, regulasi serta rencana dan desain program. c) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan yang mereka jalankan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Grindle (dalam Winarno, 2014) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Lebih lanjut diuraikan bahwa implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana dan prasarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan pengharapan bahwa dapat sampai sampai pada tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik merupakan pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana yang selanjutnya diterjemahkan dalam program-program tindakan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang diimplementasikan dalam kebijakan.

Agustino (2014), mengatakan bahwa "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri". Untuk mencapai suatu keberhasilan kebijakan, maka tantangan – tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan harus dapat teratasi sedini mungkin. Selain itu untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program atau kegiatan

melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai system politik, kebijakan public diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Grindle (1980), mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel dari isi kebijakan ini mencakup antara lain : 1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis dari manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh misalnya, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan yang dibuat; 4) apakah penempatan sebuah program sudah tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup antara lain : 1) seberapa besar dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut; 2) karakteristik dari institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas para kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:149-150) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tahap implementasi tidak akan dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran belum ditetapkan terlebih dahulu atau identifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Oleh karena itu tahap implementasi terjadi apabila undang-undang telah ditetapkan dan dana telah disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

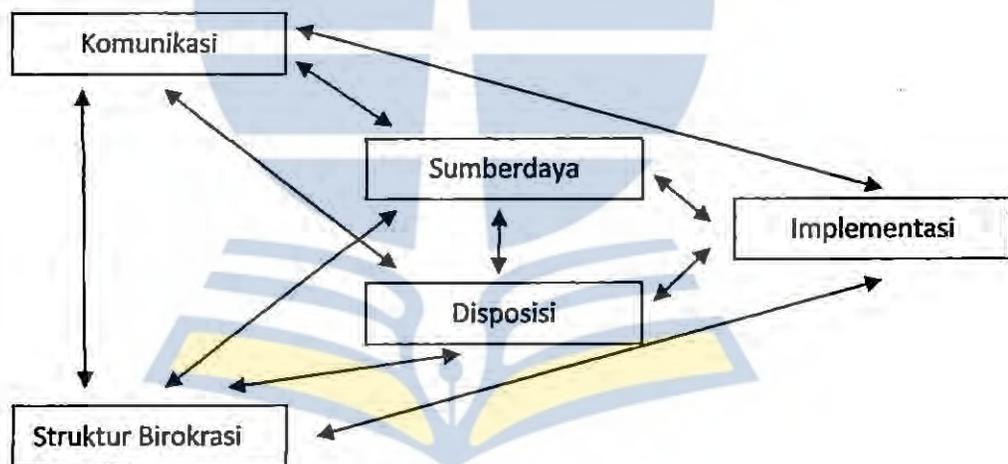
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka *implementor* tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika *implementor* memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari

para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Struktur birokrasi menurut Edward III berkaitan dengan struktur dan mekanisme pelaksanaan, hubungan-hubungan yang terjadi serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi yang semuanya perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi efektivitas implementasi program. Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Edward III (1980 : 148)

Gambar 2.2 : Model implementasi George Edward III

George Edward III menguraikan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi para pelaksana, yang masing-masing saling berhubungan dan mempengaruhi antar variabel.

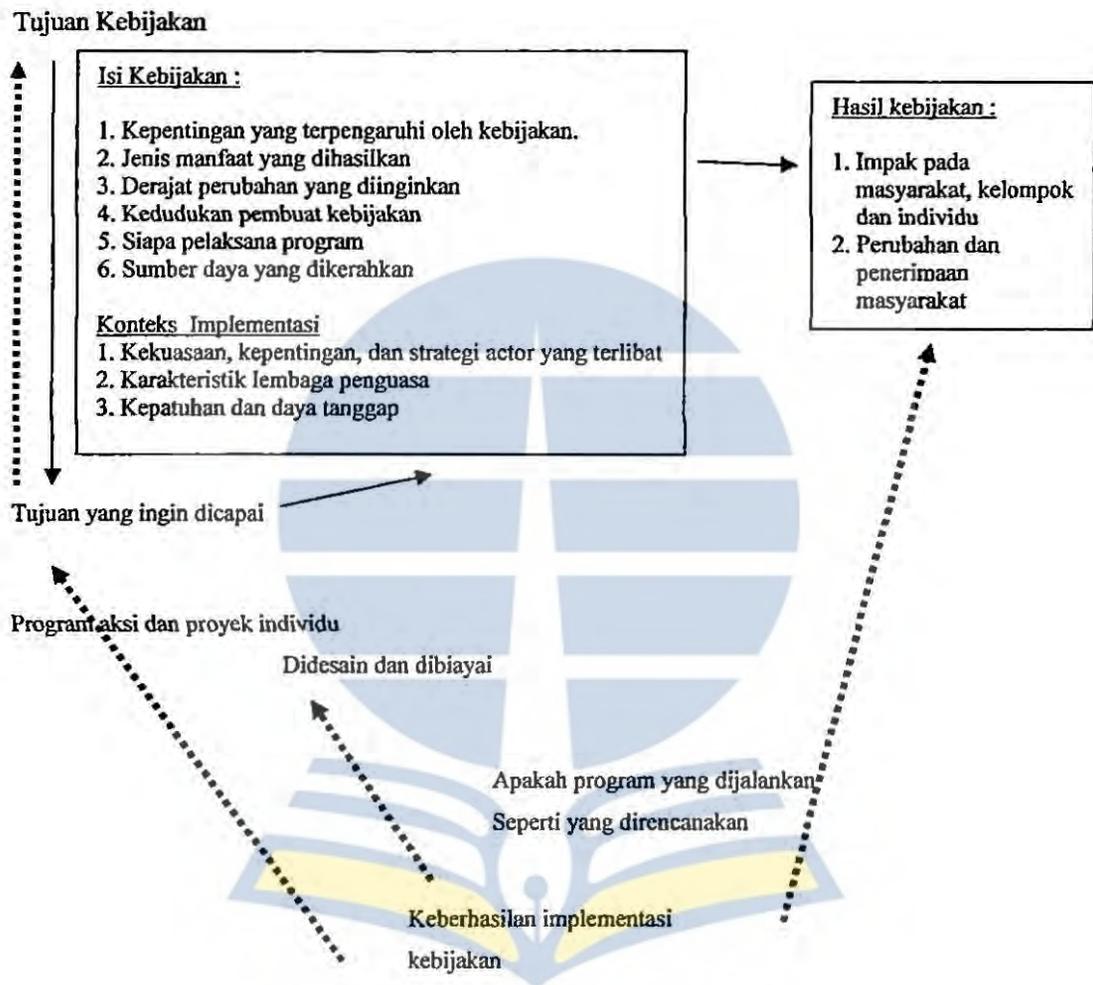
2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakantelah menyebutkan *implementornya* dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:7) bahwa keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcomes*) tergantung kepada kegiatan program yang telah didesain dan pembiayaan yang memadai. Kemudian faktor lain yang berpengaruh dalam proses implementasi adalah isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks implementasi (*the context of policy*). Isi program-program publik dan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil inisiatif implementasi. Isi kebijakan atau program sering menjadi faktor penting karena dampak nyata atau kuat yang dimilikinya terhadap keadaan sosial, politik, dan ekonomi. perlu diperhatikan konteks atau lingkungan tempat tindakan administratif dilakukan. Grindle berpendapat bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku.

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan *implementor*, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi

sumberdaya implementasi yang diperlukan. Variabel-variabel tersebut kemudian dapat tertuang seperti Gambar 2.3.



Gambar 2.3 : Model M.S. Grindle

Sumber : M.S. Grindle, 1980(sebagaimana dikutip dalam Nugroho, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang : Model – model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, 2008)

3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan,

sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Ada enam variabel yang menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah :

a) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap - tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c) Karakteristik agen pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana .

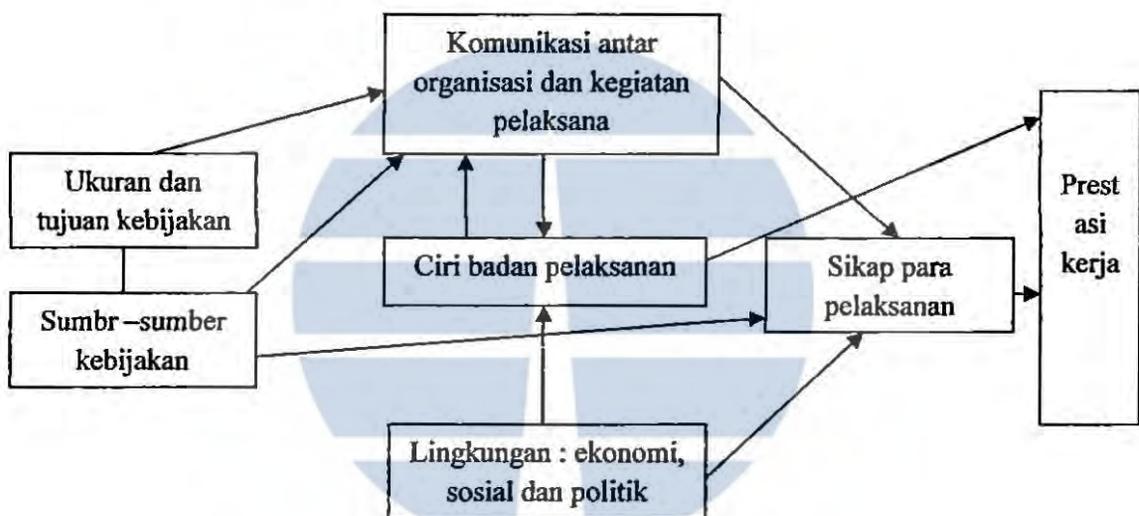
Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementasikan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana .

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan. Variabel-variabel tersebut kemudian dapat tertuang seperti Gambar 2.4.



Sumber : Donald Van Meter dan Carl Van Horn, 1975(sebagaimana dikutip dalam Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2014)

Gambar 2.4 : Model Implementasi Model Van Meter dan Van Horn

3. Konsep implementasi kebijakan

Anderson (dalam Nurharjadmo, 2008:215-28) menyatakan bahwa dalam studi implementasi perlu dikaji 4 aspek. Keempat aspek tersebut adalah siapa yang mengimplementasikan, hakekat dari administrasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Sementara itu menurut Riply dan Franklin (dalam Suryawati, 2006:121 – 130), bahwa ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening?* (apa

yang terjadi?). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan, sehingga untuk *what's happening* mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang akan muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Grindle (dalam Wahab, 2000:127) menyebutkan proses pelaksanaan kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila; “tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; Program-program aksi telah dirancang dan; Sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut”. Sehubungan dengan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, agar penyelenggaraan program Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan; sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Sedangkan Hogwood dan Gun (dalam Wahab, 2000:230-244) mengemukakan bahwa untuk melaksanakan kebijakan secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijakan yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Konsep yang dikemukakan oleh para ahli di atas, adalah merupakan sebuah studi implementasi yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan *implementor* atau pelaksana terhadap aturan yang ditetapkan, melainkan juga mempertanyakan hambatan yang muncul dan dukungan yang diperlukan dalam proses implementasinya. Studi tentang implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah program kebijakan dirumuskan dan apa yang akan timbul dari program kebijakn tersebut. Suatu implementasi kebijakan tidak hanya terkait pada persoalan administratif saja, sehingga dalam penelitian ini nantinya akan melihat pada fokus ingin mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan *relevan* dengan penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2014), yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Persalinan Studi Kasus di Puskesmas Depok III. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi program Jaminan Persalinan di Puskesmas Depok 3 Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada Tahun 2011, 2012, dan 2013. Berdasarkan analisa dari

indikator policy output dan policy outcome didapat hasil bahwa kinerja implementasi jaminan persalinan di Puskesmas Depok 3 belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena implementasi jaminan persalinan tidak mencapai initial outcome tetapi sudah mampu memenuhi intermediate outcome dan longterm outcome. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi tidak berhasil maksimal. Faktor tersebut adalah komunikasi, penentuan tarif yang tidak tepat dan struktur birokrasi yang terlalu panjang. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, peneliti membuat rekomendasi kebijakan agar kebijakan jaminan persalinan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan yang disusun peneliti yaitu, (1) memodifikasi kebijakan, (2) penentuan tarif yang tepat, dan (3) reformasi struktur birokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nusi (2014) dengan Judul “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo)” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jamkesta di Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan di lapangan yang menghambat pencapaian tujuan program, baik dalam hal sosialisasi program, pembiayaan kapitasi, serta prosedur pelayanan yang tidak jelas secara teknis pelaksanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laud (2012) yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang masih belum optimal. Pendistribusian kartu, jumlah cakupan rawat jalan tingkat pertama, pemanfaatan (utilisasi) pelayanan kesehatan miskin serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian dari Laud (2012) menjadi relevan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena jenis penelitian sama, yaitu penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Namun dalam penelitian ini menggunakan tempat, waktu, dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Laud (2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (Studi pada Puskesmas Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara). Penelitian ini menfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis pada Puskesmas Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara yang memiliki tugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pelayanan kesehatan gratis dapat diselenggarakan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mencapai tujuan sesuai dengan harapan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tingkat keberhasilan implementasi suatu

kebijakan diukur dengan kualitas kinerja dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kinerja kualitas implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis pada Puskesmas Kecamatan Sukamara adalah sangat baik. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan sangat baik, manfaat dari kebijakan pelayanan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan kebijakan ini diterima baik oleh masyarakat. Namun ada beberapa kendala yang tidak dapat dihindari namun tidak berpengaruh besar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah faktor sumberdaya, wawasan dan sikap.

Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2011) yang berjudul “ Implementasi Perda No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengimplementasikan Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda tersebut. Pelaksanaan Perda tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah guna membiayai kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang menelusuri jejak langkah Pemda Wakatobi dalam Mengimplementasikan Perda Nomor14 Tahun 2006 di wilayah Kabupaten Wakatobi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data dianalisis dengan menelaah seluruh data, kemudian membuat abstraksi yang dilanjutkan dengan penyajian serangkaian informasi secara objektif

dan rasional mengenai data atau fakta yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah daerah, khususnya Kantor KP2KP dalam mensosialisasikan Perda tersebut belum maksimal. Kurangnya sosialisasi tersebut berimplikasi pada tingginya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap isi Perda serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda No. 14 Tahun 2006 adalah faktor sumberdaya, yakni terbatasnya dana yang dimiliki kantor KP2KP dalam mensosialisasikan Perda tersebut serta keterbatasan kompetensi pegawai lapangan dalam memberikan keterangan kepada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan uang retribusi yang harus mereka bayar. Disamping itu terlihat pula adanya kekurangikhlasan pegawai instansi terkait dengan implementasi Perda No. 14 Tahun 2006.

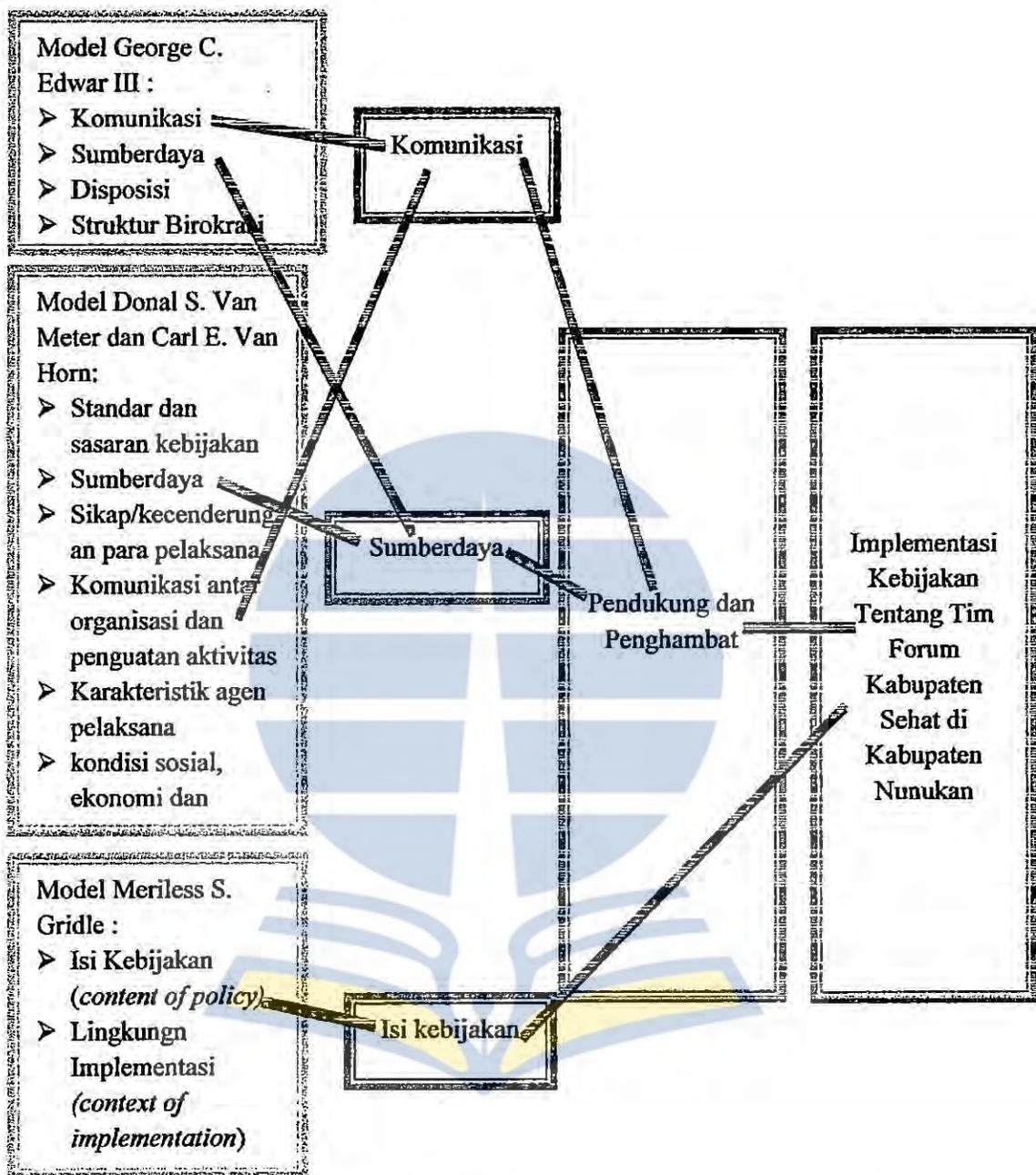
C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh forum kabupaten sehat, antara lain : kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tim forum kabupaten sehat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui program kabupaten sehat yang sudah dicanangkan, walaupun masyarakat secara tidak langsung telah mendukung program tersebut antara lain melalui kegiatan jumat bersih. Masalah umum lainnya adalah belum adanya kerjasama lintas sektor yang baik. Antara pengurus Forum Kabupaten Sehat (Forkahat) dengan beberapa anggota Tim Pembina belum ada keterpaduan dalam persepsi dan pelaksanaan kegiatan, sehingga program-program Forkahat belum sepenuhnya dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kebijakan untuk menangani permasalahan penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Dimana Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan yang variabelnya terdiri atas:

1. Isi kebijakan, meliputi:
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e. (Siapa) pelaksana program.
 - f. Sumberdaya yang dihasilkan.
2. Komunikasi
3. Sumberdaya

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dan apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan.



Sumber : Edward III, 1980, M.S. Grindle, 1980, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, 1975.

Gambar 2.5. Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep

1. Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana Program Kabupaten Sehat yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi kebijakan Tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*). Isi kebijakan meliputi :

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat atau tim forum kabupaten sehat disebutkan didalam sebuah kebijakan atau program kabupaten sehat;

b. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Apa manfaat kolektif yang dirasakan oleh anggota tim Forum Kabupaten Sehat dengan adanya kebijakan program kabupaten sehat melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Sejauh mana perubahan yang terjadi pada lingkungan dan masyarakat dengan adanya kebijakan program kabupaten sehat.

Jika kebijakan itu berdampak positif maka kebijakan tersebut tentunya akan berdampak luas terhadap pola hidup bersih bagi

masyarakat, jika tidak maka kebijakan tersebut tentunya memiliki konsekuensi salah satunya adalah dengan dibubarkannya tim Forum Kabupaten Sehat yang telah dibentuk atau memiliki legalitas hukum.

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Ketepatan program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan kesehatan masyarakat sudah tepat untuk mendukung pelaksanaan program kabupaten sehat.

e. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

f. Sumberdaya yang disediakan.

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan adalah situasi-situasi atau gejala-gejala yang terjadi yang mempengaruhi dan menentukan berhasil tidaknya pencapaian program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang

mendukung implementasi kebijakan, adalah komunikasi, dan sumberdaya. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan tim Forum Kabupaten Sehat kepada masyarakat dan sumberdaya merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga penyelenggaraan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan dapat berjalan dengan lancar. Faktor tersebut akan menentukan apakah implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika kedua variabel tersebut diperhatikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian non eksperimental (observasional), dan bersifat kualitatif untuk menggali informasi lebih mendalam dan memperoleh penjelasan secara terperinci tentang fenomena. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif diharapkan dapat menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Informasi

Sumber informasi dari penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan forum kabupaten sehat seperti :

- a. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;
- b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;
- c. Pengurus Forum Kabupaten Sehat (Forkahat) Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Kesehatan Lingkungan dan Fisik, Ketua Bidang Sosial dan Budaya, Ketua Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Ketua Bidang Data dan Hubungan Masyarakat;
- d. Masyarakat di Kecamatan Nunukan.

2. Pemilihan informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik *Purposive* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan –pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, seorang informan ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Informasi menurut Moleong (2007) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relative

singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

3. Jumlah Sumber Informasi

Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 30 orang, yang disurvei dari berbagai tingkatan, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Ketua Forkahat, Sekretaris Forkahat, Bendahara Forkahat, ketua Bidang Kesehatan Lingkungan dan Fisik, Ketua Bidang Sosial dan Budaya, Ketua Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Ketua Bidang Data dan Hubungan Masyarakat, dan warga masyarakat di Kecamatan Nunukan.

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian Implementasi Kebijakan Kebijakan tentang Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang disusun sebelum melakukan pengumpulan data. Di samping itu peneliti melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan melakukan kajian dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi,

agar dapat menggali banyak informasi dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen.

Pengumpulan data dilakukan dalam 3 tahap :

- a. Tahap pertama, *indepth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (responden) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari masyarakat dan aparatur pelaksana implementasi langsung melalui komunikasi dua arah. Agar dapat mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan, Peneliti harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada informan sehingga informan dapat merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terbuka dan jujur.
- b. Tahap kedua, observasi dan pengamatan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan pada obyek yang diteliti, saat melakukan penelitian. Teknik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
- c. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pendukung dalam proses pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau literatur dan bahan-bahan yang tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk melengkapi keakuratan data. Dalam hal ini peneliti juga akan menggunakan alat

dokumentasi (kamera). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dalam bentuk buku referensi, artikel, data pelayanan, dan laporan pengaduan layanan. Disamping itu peneliti melengkapi dengan gambar-gambar dan rekaman peristiwa dari situasi sosial yang ada di lapangan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (dalam Moleong 2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Untuk menjamin kebenaran data (*credibility*), memperoleh tingkat relativitas kesamaan data pada situasi lain yang lebih tinggi (*transferability*), konsistensi yang sesuai dengan setiap proses studi dan kenyataan yang ada di lapangan (*dependability*), dan memastikan data dapat dikonfirmasi atau disepakati oleh subyek atau informan (*confirmed*). Maka teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Teknik uji kredibilitas (kebenaran data)

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Teknik Triangulasi

Teknik Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber) dengan berbagai cara (triangulasi teknik) dan dengan berbagai waktu (triangulasi waktu) agar mendapat kepastian data yang lebih obyektif.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk meng*cross-check* silang jawaban dari masing-masing sumber data. Misalnya informasi yang diperoleh dari informan yang satu ditanyakan kembali kepada informan yang lain dan sebaliknya. Dengan menggunakan berbagai teknik, informasi yang telah diperoleh melalui wawancara digali kembali melalui teknik observasi dan/atau dokumentasi dan sebaliknya.

b. Analisis kasus negatif

Teknik ini digunakan untuk mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila semakin minim data yang berbeda berarti data yang telah diperoleh sudah dapat dipercaya.

c. Menggunakan bahan referensi

Dengan teknik ini peneliti dapat membuktikan data yang telah ditemukan melalui pendukung kebenaran data seperti hasil rekaman

wawancara dan foto-foto tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan.

2. Pengujian *transferability*

Pengujian *transferability* hasil penelitian adalah dengan cara memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya untuk menunjukkan sejauhmana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain yang memiliki karakteristik sama.

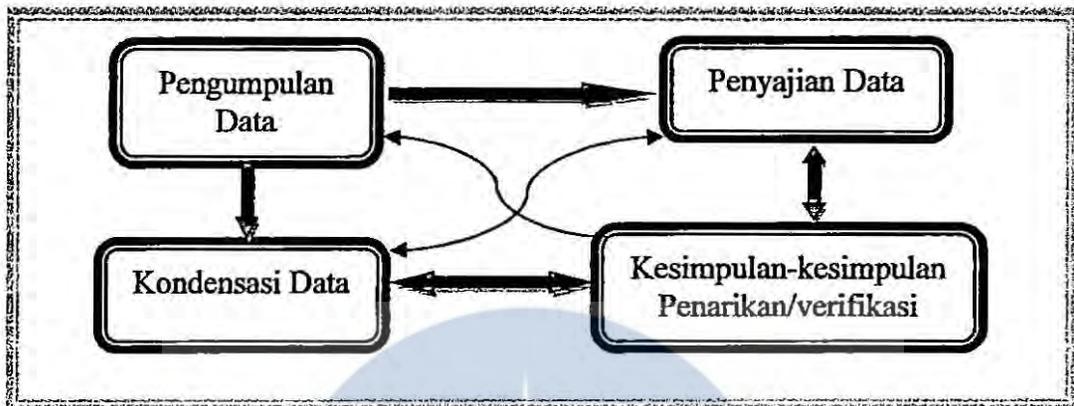
3. Pengujian *dependability*

Pengujian *dependability* atau disebut reliabilitas dalam penelitian kualitatif, dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian sehingga hasil penelitian akan dianggap reliabel apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley. Miles and Huberman (dalam Saldana 2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas dan datanya sampai jenuh. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data kolektif (*data collection*), Kondensasi data (*data condensaction*), *display data*, dan pengambilan kesimpulan (*conclusion*

drawing/verification). Model interaktif yang dimaksud adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.



Sumber: Miles and Huberman (dalam Saldana, 2014:14)

Gambar 3.1: Analisis Data Model Interaktif

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yang tahapannya sebagai berikut:

a. Sebelum di lapangan

Pada tahap ini analisis data dilakukan terhadap data sekunder hasil studi pendahuluan, sehingga data yang diperoleh dapat memperjelas fokus penelitian.

b. Selama dan setelah dari lapangan

Selama di lapangan peneliti telah melakukan analisis data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi, bila dari hasil analisis data yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan kegiatan tersebut sampai pada tahap tertentu dimana peneliti merasa

data yang diperoleh sudah jenuh. Setelah dari lapangan, analisis data dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Kondensasi data

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, untuk itu perlu segera dilakukan kondensasi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2) Menyajikan data

Setelah data dikondensasi, selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Pada penelitian kualitatif data bisa disajikan dalam bentuk uraian kualitatif, bagan, grafik, tabel, gambar, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, sehingga dapat menggambarkan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan.

3) Penarikan kesimpulan

Berdasarkan penyajian data, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian, sehingga selanjutnya dapat disusun solusi pemecahan masalah berdasarkan temuan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Forum Kabupaten Sehat (Forkahat) di Kabupaten Nunukan baru dilaksanakan pada Tahun 2012, program ini lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat. Kabupaten sehat merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif masyarakat (*capacity building*) menuju hidup sehat. Program ini merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengarah kepada pencapaian kabupaten idaman atau kabupaten sehat yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenteraman dan kesehatan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Pendekatan kota sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada Tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong '*Ottawa Charter*', yang menekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai dan langgeng, jika semua aspek sosial, ekonomi lingkungan dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan semata, tetapi lebih kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Kota Sehat di Indonesia dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998. Sejak itu telah tercatat sebanyak 51 kota

mengupayakan penyelenggaraan kota sehat, dengan melibatkan para pihak (*stakeholders*).

Dalam rangka upaya peningkatan pemahaman terhadap beberapa pihak terkait dampak pembangunan terhadap kesehatan, lalu aspek kesehatan dijadikan sebagai kebijakan di setiap pengelolaan program kesehatan, lintas sektor dan masyarakat, maka pihak kesehatan perlu kemampuan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi. Konsep kota/kabupaten sehat di seluruh daerah sama, yaitu berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Selain itu konsep kota/kabupaten sehat lebih mengutamakan pendekatan daripada target, tidak mempunyai batas waktu dan berkembang secara dinamik sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh masyarakat yang dapat dicapai secara bertahap.

Tujuan kabupaten sehat adalah tercapainya kondisi kota untuk hidup dengan aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah. Sasaran dari kabupaten ssehat adalah :

- a. Terwujudnya forum yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
- b. Terselenggaranya upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya resiko

- penyakit dengan memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya di kota secara mandiri.
- c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil dan merata bermutu sesuai dengan standar dan etika profesi.
 - d. Terselenggaranya pola dan mekanisme kerja yang transparan antar berbagai pihak yang terkait dalam proses pengelolaan pembangunan kota.
 - e. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik.
 - f. Terselenggaranya kinerja pemerintah yang baik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas melalui kebijakan dan pengaturan pelaksanaan yang adil dan transparan.

Penerapan kegiatan kabupaten sehat didasarkan kepada pendekatan kabupaten sehat di masing-masing wilayah atas dasar adanya permasalahan yang spesifik yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk dipecahkan dan diselesaikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut, dan apabila diperlukan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Pendekatan kabupaten sehat dimulai dari beberapa kecamatan, sedangkan pendekatan kecamatan sehat dimulai dari beberapa desa, sedangkan kawasan dimulai dari beberapa kawasan terbatas dan diharapkan berkembang secara terus menerus dan dinamis sehingga meliputi seluruh daerah perkotaan dan daerah kabupaten, yang kemudian dapat mendorong daerah lain untuk meniru dan mengembangkannya.

Penyelenggaraan kota/kabupaten sehat adalah berbagai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Forum tersebut sebaiknya melibatkan semua instansi terkait, swasta dan LSM yang ada beserta masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat diharapkan forum kabupaten sehat tersebut dapat terbentuk mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab semua sektor, masyarakat dan swasta. Setiap kabupaten dapat ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan kabupaten sehat atas dasar kesepakatan dari masyarakat (tokoh masyarakat dan LSM setempat) bersama-sama pemerintah daerah. Di dalam pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat dijelaskan bahwa dengan dilaksanakannya gerakan kabupaten sehat setiap kepala daerah memperoleh keuntungan antara lain :

1. Adanya dukungan dari masyarakat yang dapat menguatkan posisi kepemimpinannya;
2. Dapat merupakan indikator kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam bidang pembangunan;
3. Dapat memandirikan dan memberdayakan masyarakat sehingga berperilaku dan berbudaya baik dan sehat.

Sedangkan keuntungan bagi masyarakat sendiri adalah :

1. Proses pembangunan dapat disusun bersama dengan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;

2. Masyarakat mampu dan mempunyai kesempatan menjadi rekan kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan;
3. Masyarakat bisa ikut bertanggung jawab dan ikut menilai hasil dan manfaat pembangunan tersebut.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk forum kabupaten sehat yang terdiri dari tim pembina forum kabupaten sehat dan tim forum kabupaten sehat tingkat kabupaten melalui Surat Keputusan Bupati sejak Tahun 2012, Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1135/Menkes/PB/VIII/2005 tentang pedoman penyelenggaraan kabupaten/kota sehat. Untuk lebih jelasnya diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Tim pembina forum kabupaten sehat

Tim pembina forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/137/II/2013 tentang pembentuk Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2015 yang merupakan revisi dari Surat Keputusan Bupati sebelumnya yang dikaji ulang tingkat kepengurusan dan keaktifan setiap 3 (tiga) Tahun, seperti yang diatur dalam pedoman penyelenggaraan kabupaten/kota sehat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005.

Struktur Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
Pengarah : Sekretaris Daerah
Koordinator : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Ketua : Kepala Bappeda
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : OPD-OPD

Kemudian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat sebagai anggota tim pembina adalah :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- g. Kepala Dinas Pendidikan;
- h. Kepala Dinas Perhubungan;
- i. Kepala Sosial;
- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

- l. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- m. Kepala Dinas Perdagangan;
- n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- o. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- p. Kepala Bagian Pembangunan
- q. Sekretaris Bappeda
- r. Ketua Tim Penggerak PKK
- s. Kepala Badan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda
- t. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- u. Sekretariat: 10 orang unsur dari Bappeda.

Tim Pembina memegang peranan penting dalam implementasi kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Tugas tim pembina adalah bertanggungjawab dalam memperkuat Kabupaten sehat, melindungi setiap aspek pembangunan kabupaten sehat dan menyiapkan dukungan dan pembiayaan. Dalam SK Bupati Nunukan diuraikan bahwa tim pembina bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan kabupaten sehat
- b. Menentukan standar dan indikator yang dipilih
- c. Merumuskan usulan
- d. Membina penyelenggaraan kabupaten sehat
- e. Membina pelaksanaan tatanan yang dipilih
- f. Mengkoordinasikan perencanaan antar OPD
- g. Menyelenggarakan forum diskusi, seminar dan lokakarya

h. Melakukan persiapan dalam rangka pemberian penghargaan kabupaten sehat, kecamatan sehat, desa/kelurahan sehat, dan

i. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, tim pembina forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan yang diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Nunukan melalui forum telah dan akan menyelenggarakan berbagai program yang ditetapkan diantaranya adalah :

- a. Mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali antara anggota tim pembina dan agenda pokok tentang upaya – upaya mensinergikan program organisasi perangkat daerah dengan forum kabupaten sehat serta usaha mempercepat terciptanya Nunuka Sehat Tahun 2017.
- b. Menyelenggarakan rapat gabungan antara tim pembina, organisasi perangkat daerah dan tim forum kabupaten sehat secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah setiap saat apabila terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan.
- d. Rapat khusus antara tim pembina dengan tim forum kabupaten sehat yang bersifat insidental.
- e. Memonitor kegiatan forum kabupaten sehat dan memantau perkembangannya di lapangan.
- f. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan – kegiatan organisasi perangkat daerah.

- g. Kegiatan – kegiatan lain yang bersifat pembinaan, baik kepada forum kabupaten sehat tingkat kabupaten maupun forum Komunikasi Desa/Kelurahan tingkat kecamatan.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim pembina di atas, menunjukkan bahwa tim pembina kabupaten dalam mendukung kegiatan forum kabupaten sehat sangat bersungguh – sungguh menaruh perhatian, sehingga dampaknya adalah meningkatnya aktifitas forum itu sendiri. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang diharapkan dapat menjadi dapur perencanaann yang dapat mensupport implementasi penyelenggaraa kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang tidak hanya sebagai sebuah lembaga OPD, tetapi benar-benar dapat menjadi lembaga yang dapat memahami kebutuhan perencanaan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan.

2. Tim Forum Kabupaten Sehat (Forkahat) kabupaten

Sejak dibentuknya tim Forum Kabupaten Sehat (Forkhat) di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2012, telah melakukan revisi/penyegaran pengurus sebanyak empat kali, hal ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan kinerja forum agar benar – benar fokus pada kegiatan serta lebih efektif dan efisien. Dalam menjalankan program kabupaten sehat di Kabupten Nunukan tim forum kabupaten sehat (forkahat) selalu berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/392/VI/2012 tentang pembentukan forum kabupaten sehat di Kabupaten

Nunukan Tahun 2012. Tugas dan fungsi tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua forum kabupaten sehat mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi forum kabupaten sehat
- b. Wakil ketua forum kabupaten sehat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas ketua dalam mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi forum, yaitu :
 - 1) Menyiapkan rencana Tahunan pengendalian dan pengawasan *interen* dan ke forum komunikasi kecamatan sehat tentang kegiatan kecamatan yang disepakati;
 - 2) Mendorong kemandirian masyarakat menciptakan lingkungan pemukiman dan perilaku hidup sehat dan agar setiap pembangunan berwawasan sehat;
 - 3) Menghimpun permasalahan lingkungan pemukiman, sosial ekonomi yang tidak sehat di setiap kecamatan binaan;
 - 4) Mengadakan pertemuan evaluasi upaya kegiatan kabupaten sehat secara *interen*, lintas sektor terkait dan forum komunikasi kecamatan sehat setiap triwulan.
- c. Sekretaris forum kabupaten sehat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan forum komunikasi kecamatan sehat dan pokja kelurahan/desa sehat serta tugas lain yang diberikan ketua.

- d. Wakil sekretaris forum kabupaten sehat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris, menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan forum komunikasi desa di tingkat kecamatan dan pokja kelurahan/desa serta tugas lain yang diberikan ketua;
- e. Bendahara forum kabupaten sehat mempunyai tugas:
- 1) Mengumpulkan dan mengkoordinir uang masuk dan uang keluar;
 - 2) Menyalurkan bantuan yang diserahkan ke forum kabupaten kepada forum komunikasi desa di tingkat kecamatan;
 - 3) Membukukan semua pengeluaran dan pemasukan;
 - 4) Memberikan laporan serta pertanggungjawaban uang masuk dan uang keluar
- f. Bidang kesehatan dan lingkungan fisik mempunyai tugas:
- 1) Mengumpulkan bahan/data kualitas fisik lingkungan sarana dan prasarana serta perilaku hidup sehat;
 - 2) Menyusun rencana penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan berdasarkan usulan masing-masing forum komunikasi desa tingkat kecamatan atau masyarakatnya;
 - 3) Menyalurkan bantuan penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan dari tingkat kabupaten atau yang disalurkan melalui forum kabupaten sehat;
 - 4) Sosialisasi teknis penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan sehat ke kecamatan dan kelurahan/desa sehat;
 - 5) Melakukan pembinaan dan monitoring penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan sehat.

g. Bidang sosial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan program kabupaten sehat kepada forum komunikasi desa di kecamatan dan pokja kelurahan/desa sehat maupun masyarakat;
- 2) Menyusun rencana kegiatan penyuluhan lingkungan sehat, sosial budaya;
- 3) Melakukan penelitian masalah upaya percepatan mewujudkan kabupaten sehat di kecamatan dan kelurahan/desa sehat;
- 4) Melakukan pengkajian atau inovasi upaya peningkatan dan percepatan pembangunan kegiatan kabupaten sehat di setiap kecamatan dan kelurahan/desa sehat;
- 5) Melakukan pengembangan kegiatan kabupaten sehat ke kecamatan dan kelurahan/desa yang belum melaksanakan.

h. Bidang ekonomi mempunyai tugas:

- 1) Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum komunikasi desa di kecamatan dan pokja kelurahan/desa sehat seperti lembaga swadaya masyarakat, swasta dan pemerintah;
- 2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelatihan sumberdaya manusia para pelaku pembangunan kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa sehat di Kabupaten Nunukan;
- 3) Melakukan survei dan analisa data permasalahan ekonomi dan sosial budaya dan perilaku masyarakat suatu wilayah kecamatan dan kelurahan/desa sehat binaan di Kabupaten Nunukan;

- 4) Melakukan advokasi dukungan kegiatan program kabupaten sehat dan pendanaannya kepada Pemerinda Daerah, DPRD, masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Nunukan;
 - 5) Mencari donatur untuk mendukung program dan kegiatan kabupaten sehat.
 - 6) Menghimpun sumber pendanaan untuk perencanaan kegiatan kabupaten sehat Tahun depan.
- i. Bidang data dan hubungan masyarakat mempunyai tugas:
- 1) Mengumpulkan data laporan hasil kegiatan kabupaten sehat;
 - 2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan kabupaten sehat kepada organisasi masyarakat dan pelajar secara langsung dan media massa;
 - 3) Melakukan dokumentasi masalah kualitas lingkungan dan sosial ekonomi setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang melaksanakan program kecamatan dan kelurahan/desa sehat sesuai tatanan yang dipilih;
 - 4) Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberitaan, media massa dan dokumentasi;
 - 5) Mengumpulkan data dasar fisik lingkungan sarana dan prasarana serta ekonomi sosial budaya suatu wilayah kecamatan dan kelurahan/desa sehat.
- j. Sekretariat mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu pelayanan administrasi kegiatan forum kabupaten sehat.

Dalam kiprahnya, sejak tim forum kabupaten sehat (forkahat) terbentuk sudah banyak yang dilaksanakan terkait dengan penciptaan suasana yang

mendukung tercapainya Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat. secara manajemen yang telah dilakukan antara lain ; mengkonsolidasikan organisasi, pembagian tugas dan kewenangan baik untuk anggota maupun pengurus inti serta upaya menggerakkan Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan pokja di tingkat desa/kelurahan. Secara administratif tim forum kabupaten sehat berusaha memfungsikan diri sebagai organisasi yang baik yakni dengan menginventarisir segala permasalahan forum, pendataan dan penetapan program yang relevan, pendokumentasian kegiatan, melengkapi data yang diperlukan serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh tim forum kabupaten sehat (forkahat) Kabupaten Nunukan adalah melakukan pembentukan dan pengukuhan pengurus forum komunikasi desa/kelurahan di 9 (sembilan) kecamatan dan membantu serta mendorong pembentukan dan pengukuhan terhadap 25 kelompok kerja (pokja) desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka forum komunikasi kelurahan/desa telah membentuk pokja kelurahan/desa sehat di masing – masing pokja.

Kegiatan forum komunikasi desa/kelurahan tidak hanya sebatas pada pembentukan dan sosialisasi saja, tetapi juga melakukan kegiatan – kegiatan nyata yang berorientasi bagaimana menciptakan dan mendukung terwujudnya Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat. Kelompok kerja (pokja) kelurahan/desa sehat merupakan ujung tombak program kegiatan kabupaten sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh pokja antara lain mengadakan sosialisasi kepada ketua RT, kader

posyandu, PKK dan tokoh – tokoh masyarakat di lingkungannya, kemudian melakukan berbagai kegiatan seperti kerja bakti kebersihan lingkungan dan kegiatan – kegiatan lain yang terkait dengan penciptaan desa sehat dan akhirnya terbentuk kabupaten sehat.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, tim forum kabupaten sehat (forkahat) memerlukan kantor atau sekretariat. Dalam sebuah organisasi apapun bentuk dan jenisnya, hal yang paling pokok selain pengurus yang solid, maka sebuah kantor atau sekretariat adalah kebutuhan yang harus dan wajib terpenuhi. Forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan sangat bersyukur, ketika organisasi ini terbentuk, gayung bersambut, Kepala Daerah langsung memberikan dukungan dalam bentuk sekretariat ini sebagai kantor kesekretariatan forkahat walaupun hanya kontrak. Pada Tahun 2015 forum kabupaten sehat (forkahat) sudah memiliki sekretariat yang tetap dan tidak lagi mengontrak.

Untuk mensukseskan pelaksanaan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka tim forum kabupaten sehat (forkahat) memiliki strategi. Strategi ini menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan antara lain untuk : (1) menentukan secara detail bagaimana strategi akan dilaksanakan; (2) mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran; (3)

menciptakan kebijakan di mana setiap pejabat dan pelaksana di suatu organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan dapat mengimplementasikan sebuah keputusan. Kebijakan minimal yang wajib dikembangkan, meliputi : (a) kebijakan publik, (b) kebijakan teknis, (c) kebijakan sumberdaya organisasi, (d) kebijakan personalia, (e) kebijakan keuangan, dan (f) kebijakan pelayanan masyarakat.

Strategi yang telah diambil oleh forum kabupaten sehat (forkahat) Kabupaten Nunukan adalah :

- a. Menggalang kemitraan dengan lembaga dan institusi dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan daerah secara bertahap dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat;
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui forum komunikasi desa/kelurahan sehat, kelompok kerja desa sehat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan bertahap di mulai dari yang spesifik, sederhana, terjangkau serta dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan promosi untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap menjaga lingkungan baik fisik, sosial dan budaya;
- e. Menggali sumberdaya masyarakat dan menentukan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan kesehatan dalam mewujudkan kabupaten sehat;

- f. Mengembangkan kegiatan kabupaten sehat yang sesuai dengan visi dan misi yang dipahami masyarakat.

Strategi yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan oleh semua tim yang terlibat dalam forum kabupaten sehat untuk mendukung terwujudnya visi dan misi kabupaten sehat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh forum kabupaten sehat (Forkahat) adalah sebagai berikut :

- a. Re-organisasi kepengurusan forum kabupaten sehat (forkahat) serta mempersiapkan diri mengikuti penilaian kabupaten sehat setiap 2 Tahun sekali;
- b. Pemilihan tatanan kabupaten sehat yang akan dipersiapkan untuk mengikuti penilaian kabupaten sehat;
- c. Untuk desa/kelurahan sehat ditetapkan indikator desa/kelurahan sehat meliputi :
 - 1) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan;
 - 2) Tersedianya sarana air bersih/minum;
 - 3) Tersedianya jamban keluarga;
 - 4) Tersedianya sarana olah raga;
 - 5) Tersedianya pembuangan sampah;
 - 6) Terciptanya perilaku hidup sehat, yaitu tidak merokok ditempat umum (sekolah, terminal, kantor dan lain-lain), tidak berjudi, tidak mengkosumsi minuman keras dan narkoba, membiasakan cuci tangan sebelum makan, buang air besar dan buang sampah pada tempatnya, melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

Forum kabupaten sehat (forkahat) Kabupaten Nunukan sampai bulan Agustus Tahun 2017 memiliki sumberdaya sebanyak 34 orang.

B. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses implementasi yang meliputi isi kebijakan, sumberdaya dan komunikasi dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan forum kabupaten sehat (forkahat) dapat disampaikan secara berurutan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

Isi Kebijakan meliputi beberapa bagian diantaranya adalah :

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Untuk mengetahui apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat (forkahat) dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan informan 1 mengatakan bahwa :

“Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan program kabupaten sehat, semua masyarakat diperlakukan sama dan akan diberi bantuan bagi yang betul-betul perlu dibantu”.

Selanjutnya informan 2 mengungkapkan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan kabupaten sehat, forkahat tidak memiliki kepentingan tertentu, hanya murni kepentingan bagaimana menciptakan Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten yang sehat dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan”

Kemudian informan 3 mengatakan bahwa :

“ Tidak ada kepentingan khusus, karena kita melihat dari perilaku masyarakat sehari-hari saja, apakah mereka sudah berperilaku hidup bersih dan sehat atau tidak, hal ini terlihat semua masyarakat bergilir memperoleh bantuan untuk menunjang peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat”.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat tidak ada kepentingan yang mempengaruhi secara khusus, jadi dalam melaksanakan program kegiatan tim forkahat memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup sehat dan berperilaku hidup sehat, sehingga tercipta lingkungan yang sehat.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan disosialisasikannya program kabupaten sehat melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh tim forum kabupaten sehat. Informan 4 mengatakan bahwa :

“ Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, di mana ada beberapa RT yang diberi bantuan berupa pembuatan jamban keluarga dan RT tersebut sangat terbantu karena tempat Buang Air Besar (BAB) sudah tersedia dan tidak lagi BAB di sembarang tempat”

Selanjutnya informan 5 mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya tim forkahat, masyarakat sangat terbantu khususnya di dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi, seperti adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dapat diketahui oleh masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan oleh tim forkahat.

Selanjutnya informan 6 mengatakan bahwa :

“ Sasaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh tim forkahat adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan yang kurang sehat dan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah”.

Jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat adalah, dengan adanya tim tersebut dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Dengan adanya program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka perubahan yang diinginkan menurut informan 4 adalah :

“ Kami mengharapkan tercapainya kondisi Kabupaten Nunukan yang bersih, nyaman, aman dan sehat, sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki kondisi kesehatan yang baik dengan didukung lingkungan yang sehat karena masyarakat sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatan”.

Hal Senada disampaikan oleh informan 2 bahwa ,

“ Perubahan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan program forum kabupaten sehat di daerah ini adalah agar tercapai kondisi kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas serta perekonomian masyarakat”.

Lebih lanjut informan 7 mengatakan bahwa :

“ Program kabupaten sehat ini sangat baik karena dapat membawa perubahan terutama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah di sembarang tempat dan buang air besar tidak pada tempatnya, dengan disosialisasikannya program kabupaten sehat ini, maka sebagian masyarakat sudah merubah kebiasaan tersebut sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dan derajat kesehatan dapat meningkat”.

Selanjutnya informan 8 mengatakan bahwa:

“Setiap pelaksanaan sosialisasi baik di sekolah-sekolah, di tempat pertemuan maupun secara langsung ke lapangan, masyarakat selalu hadir dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri”.

Jangkauan perubahan yang diinginkan dengan implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat adalah derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat dapat meningkat.

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Program kegiatan yang menunjang penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan menurut responde 6 adalah :

“Program kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah tepat, namun harus lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat mengetahui dan menikmati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap Tahunnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai”.

Lebih lanjut informan 8 mengatakan bahwa:

“Program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan direncanakan setiap tahun dan kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran, yaitu masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya menjaga kesehatan akan tetapi diharapkan semua unsur dapat mendukung program tersebut sehingga dapat terwujud apa yang ingin dicapai, namun dalam penyusunan rencana kegiatan tidak semua anggota tim dilibatkan, sehingga kegiatan yang dijalankan setiap tahun sama dan kegiatan bidang kesehatan saja”.

Selanjutnya informan 4 mengatakan bahwa :

“Program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan dilaksanakan sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan setiap Tahun ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat oleh tim forum kabupaten sehat yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua tim pembina kabupaten sehat Kabupaten Nunukan”.

Hal senada disampaikan oleh informan 2 bahwa :

“ Ya, program kabupaten sehat sudah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan setiap Tahun dan masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dari tim forum kabupaten sehat dibuat setiap tahun dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan juga Dinas Kesehatan serta diperiksa oleh Inspektorat sebagai instansi pengawas di daerah”.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat, program kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan mekanisme atau aturan namun dalam penyusunan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh tim forum kabupaten sehat tidak semua anggota tim dilibatkan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sama dan hanya bidang kesehatan saja.

e. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementatornya dengan rinci.

Dalam hal ini peneliti mempertanyakan kepada informan tentang bagaimana keterlibatan tim forkahat sebagai pelaksana program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Informan 5 mengatakan bahwa :

” Kami sudah memaksimalkan semua tim termasuk anggota tim di setiap bidang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing, namun kami akui kalau pekerjaan mereka belum maksimal karena keterbatasan biaya operasional sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kemasyarakat masih terbatas”.

Lebih lanjut informan 6 mengatakan bahwa :

“ Dalam menjalankan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan ada beberapa strategi yang dilaksanakan, salah satunya yaitu melakukan pendekatan langsung kemasyarakat yang kami anggap perlu untuk diberi pemahaman tentang penting berperilaku hidup bersih dan sehat, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak mendapat hambatan akan tetapi kami tetap berusaha untuk tetap melaksanakan tugas kami”.

Selanjutnya informan 9 mengatakan bahwa :

“ Kegiatan yang telah direncanakan pada setiap tahunnya pada program kabupaten sehat, kami jalankan dengan baik walaupun sebagian anggota kami ada yang kurang aktif dikarenakan adanya kesibukan lain di luar, kami sebagai ketua bidang tidak bisa juga memaksakan kepada anggota kami untuk mengerjakan secara terus menerus pekerjaan yang ada kaitannya dengan program kabupaten sehat karena mereka juga ada pekerjaan lain”.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat, tim forum kabupaten sehat telah bekerja dengan baik, namun ada beberapa anggota tim yang kurang aktif. Dalam pelaksanaan kegiatan tim forum kabupaten sehat melaksanakan beberapa strategi, yaitu pendekatan langsung kepada masyarakat yang dianggap kurang berperilaku hidup bersih dan sehat.

f. Bagaimana tim forkahat sebagai pelaksana kegiatan

Tim forum kabupaten sehat sebagai pelaksana utama dari program kabupaten sehat dalam mensukseskan implementasi kebijakan forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, menurut informan 10 bahwa :

“Sumberdaya yang ada dalam tim forum kabupaten sehat sudah difungsikan secara maksimal, walaupun masih ada beberapa anggota tim yang belum bisa bekerja secara maksimal namun kami tetap berusaha mendorong agar semua anggota tim dapat aktif bekerja demi suksesnya program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan”.

Hal senada diampaikan oleh informan 2, bahwa :

“ Sumberdaya manusia yang ada di tim form kabupaten sehat, sudah memadai karena sebagian besar anggotanya berasal dari berbagai golongan dan tingkat pendidikan dari berbagai jenjang. Ke depannya diperlukan peningkatan SDM agar program dan kegiatan dari forum kabupaten sehat lebih inovatif dan lebih bermanfaat buat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan dari tugas dan fungsi tim forkahat sudah dijalankan, namun secara keseluruhan belum maksimal karena masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, seperti sulitnya merubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal kegiatan kerjabakti atau gotong royong jumat bersih yang biasa dilaksanakan”.

Lebih lanjut informan 10 mengatakan bahwa :

“ Selama ini semua tim forum kabupaten sehat sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan nomor : 188.45/423/VI/2012 dan semua ketua bidang wajib mengontrol pekerjaan anggotanya dan tetap harus bekerjasama dengan lintas bidang yang ada dalam tim forum kabupaten sehat, sehingga program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik walaupun belum semua tupoksi tersebut dijalankan dengan baik”.

Tim forum kabupaten sehat sebagai pelaksana kegiatan dalam implementasi kebijakan tentang tim forum kabupaten sehat telah melaksanakan tugas dan fungsi walaupun belum semua tupoksi tersebut berjalan dengan baik. Semua ketua bidang wajib mengontrol pekerjaan anggotanya dan tetap harus bekerjasama dengan yang lain yang ada dalam tim forum kabupaten sehat, sehingga program kabupaten sehat dapat terlaksana dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan

Terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan dari hasil wawancara dengan beberapa informan diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan melalui mediator, dari hasil wawancara mendalam dengan informan 2 menyatakan bahwa :

“ Untuk mensukseskan program kabupaten sehat di Kabupten Nunukan, maka salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi berupa tatap muka langsung dengan masyarakat dan juga dengan organisasi perangkat daerah melalui pertemuan yang diadakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan setiap Tahun baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa bahkan dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa ketua RT sebagai pengurus forum kabupaten sehat dengan tujuan agar forum kabupaten sehat dapat dipahami secara luas”.

Hal senada disampaikan oleh informan 5 bahwa :

“ Program kabupaten sehat sudah kami sosialisasikan dengan anak sekolah, pemuda, masyarakat dan dinas/instansi baik di kabupaten maupun di kecamatan. Sosialisasi ini sudah direncanakan minimal 3 dalam satu Tahun, akan tetapi kadang hanya terealisasi 1 kali dan yang di luar pulau Nunukan tidak bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran, sedangkan untuk di wilayah pulau Nunukan, seperti Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan masih bisa kami laksanakan sosialisasi 1 kali dalam satu Tahun karena tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar”.

Selanjutnya informan 4 mengatakan bahwa :

“ Sosialisasi/pertemuan yang diadakan baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sudah sesuai yang diharapkan, namun masih ada beberapa organisasi perangkat daerah belum memahami apa itu forum kabupaten sehat dan apa fungsi dan kegunaannya, sehingga diharapkan tim forum kabupaten sehat dapat mengetahui OPD mana yang belum paham dan perlu diadakan pertemuan”.

Untuk mengetahui kejelasan dari komunikasi dan konsistensi dari para pelaksana forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang dianggap mampu memberi

jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hasil wawancara dengan informan 6 mengatakan bahwa :

“ Dalam menjalankan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan digunakan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana dalam buku pedoman ini telah diatur tata cara penyelenggaraan kabupaten sehat. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pertemuan baik dengan organisasi peragkat daerah, anak sekolah maupun masyarakat materi yang disampaikan disesuaikan dengan yang ada dalam pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat”.

Selanjutnya informan 8 mengatakan bahwa :

“Setiap kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, materi yang disampaikan selalu berdasarkan pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan materi tersebut berupa pelarangan membuang sampah di sembarang tempat, buang air besar pada tempatnya, merokok pada tempat yang telah disiapkan, menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan”.

Hal senada disampaikan oleh informan 10 bahwa :

“ Di dalam buku pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah dijelaskan pengertian kabupaten sehat, tujuan dan sasaran kabupaten sehat serta ciri-ciri kabupaten sehat”.

b. Sumberdaya

Hasil wawancara dengan informan 11 menyatakan bahwa :

” Sumberdaya yang ada dalam tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan dapat dikatakan sudah memadai, hal ini dapat kita lihat dari jumlah sumberdaya yang ada sekarang berjumlah 34 orang dan berasal dari beberapa kalangan, seperti swasta, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan bahkan pegawai negeri”.

Hal senada disampaikan oleh informan 3 bahwa:

“Saat ini tim forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan berjumlah 34 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang

sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara, 4 orang ketua bidang dan 20 orang anggota”.

Sedangkan untuk fasilitas dan biaya operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim forum kabupaten sehat, peneliti melakukan wawancara dengan informan 5 dan dia mengatakan bahwa :

“ Tim forum kabupaten sehat saat sudah memiliki sekretariat sendiri yang berada di Kelurahan Nunukan Tengah walaupun baru 2 Tahun karena sejak terbentuknya pada Tahun 2012 tim forum kabupaten sehat hanya mengontrak tempat yang dijadikan sebagai sekretariat dan sekretariat ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat”.

Hal ini diperjelas oleh informan 3 bahwa :

“ Pada Tahun 2012 tim forum kabupaten sehat ditetapkan dengan surat keputusan Bupati, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan sekretariat sebagai tempat bekerja para anggota tim, oleh sebab itu wakil ketua tim forkahat meminjamkan rumahnya untuk dijadikan sebagai sekretariat sementara dan setelah ada anggaran dari pemerintah daerah baru mengontrak rumah untuk dijadikan sekretariat dan pada Tahun 2015 pindah lagi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan sampai sekarang.”.

Selanjutnya informan 7 mengatakan bahwa :

“ Dalam menjalankan program kegiatan kabupaten sehat, kami mendapat dana dari pemerintah daerah yang dijadikan sebagai biaya operasional, lebih lanjut dikatakan bahwa dana yang pemerintah daerah berikan berupa dana hibah sebesar Rp 117.500.000,- pada Tahun 2017”.

Hal yang sama disampaikan oleh informan 3 bahwa :

“Bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terhadap forum kabupaten sehat adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk forum kabupaten sehat yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mulai dari Tahun 2013 sampai dengan 2016. Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan penyuluhan lingkungan sehat berupa honor tim forkahat, alat tulis kantor, belanja makan dan minum rapat foto copy, dan belanja perjalanan dinas”.

Hal senada disampaikan oleh informan 2, bahwa :

“Anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan setiap tahun untuk forum kabupaten sehat bervariasi, yaitu antara 250 juta sampai dengan 350 juta, di mana pos anggaran berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Dinas Kesehatan maupun dihibahkan langsung pada forum kabupaten sehat (forkahat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Informan 2 mengatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan forkahat adalah:

“ Luas wilayah Kabupaten Nunukan yang sangat besar sehingga dalam menjangkau daerah-daerah yang tertentu memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, selain itu perilaku masyarakat yang masih sulit dirubah, terutama dalam hal kegiatan kerjabakti atau gotong royong. Lebih lanjutnya dikatakan bahwa faktor yang lain adalah belum fokusnya tim forkahat dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang ada di lapangan, seperti pembinaan terhadap pasar”.

Faktor pendukung dari pelaksanaan forkahat menurut informan 2 adalah :

” Adanya dukungan dana dan program dari pemerintah daerah, kerjasama dan keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang cukup baik dan adanya dukungan dari pihak TNI dan Polri dalam beberapa program dan event”.

Selanjutnya informan 3 mengungkapkan bahwa :

“ yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kabupaten sehat adalah ada masih adanya beberapa kalangan yang beranggapan bahwa kabupaten sehat adalah milik Dinas Kesehatan atau pihak yang bergerak dalam bidang kesehatan dikarenakan terdapat kata sehat, padahal jika dipahami secara mendalam pedoman penyenggaraan kabupaten sehat, maka dapat memberikan gambaran pemahaman bahwa program kabupaten sehat harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan beberapa dinas/kantor teknis yang terkait, pihak swasta dan masyarakat”.

Faktor pendukung pelaksanaan program menurut informan 3 adalah :

“ Adanya dukungan dana dari pemerintah daerah setiap Tahun baik melalui kegiatan yang ada di kantor Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan maupun dana hibah yang langsung dikelola oleh tim forum kabupaten sehat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejak terbentuknya forum tersebut pada Tahun 2012 sudah 2 (kali) mendapat dana hibah”.

Selanjutnya informan 8 mengatakan bahwa :

“ Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah minimnya dana kegiatan yang diberikan kepada setiap bidang sehingga rencana kerja yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan semua, misalnya kami merencanakan 3 (tiga) kegiatan akan tetapi yang bisa terlaksana hanya 1 (satu) kegiatan saja. Selanjutnya dikatakan bahwa dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada. Pada Tahun 2017 ini bidang kami hanya diberi dana Rp 3.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan”.

Faktor pendukung menurut informan 8 adalah :

“ Masih besarnya respon masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang kami laksanakan sehingga memudahkan kami dalam menjalankan kegiatan kami, contohnya dalam hal pembuatan jamban keluarga dari ban bekas, antusias masyarakat sangat besar, mereka bersedia menyiapkan bahan dan kami hanya mengajari teknik dan cara-cara pembuatan jamban tersebut”.

Selanjutnya informan 10 mengatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah :

“ Kompetensi SDM tim forkahat yang masih rendah karena selama menjadi anggota tim belum pernah diberi pelatihan, seperti pelatihan tentang tata kelola organisasi, keuangan dan penyusunan laporan kegiatan yang sesuai aturan”.

Dan untuk faktor pendukung pelaksanaan program informan 10 mengatakan bahwa :

“Jumlah SDM tim forkahat yang ada saat ini sudah memadai dan berasal dari tingkat pendidikan yang beragam dan berasal dari unsur pemerintah, swasta, LSM, tokoh masyarakat dan ketua RT”.

Lebih lanjut diungkapkan oleh informan 5, bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan program kegiatan adalah :

“Sekretariat FKD di tingkat kecamatan belum ada tersendiri, sejak terbentuknya sampai sekarang masih menumpang di kantor camat, sehingga pekerjaan tim belum maksimal, lebih lanjut dikatakan bahwa kita ketahui

semua peran sekretariat sangat besar karena merupakan tempat untuk menyusun program kerja, tempat berdiskusi untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat kecamatan”.

Faktor pendukung dari pelaksanaan program menurut informan 5 adalah :

“ Ada dana dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan program kegiatan di tingkat kecamatan walaupun masih sangat minim. Untuk Tahun 2017 ini setiap Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan diberikan dana sebesar Rp 4.000.000,- untuk mendanai program kegiatan yang dilaksanakan”.

Selanjutnya informan 6 mengatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program adalah :

“ Tingkat keaktifan anggota tim forum yang masih relatif rendah, hal ini dapat kita lihat pada tingkat kehadiran dan kontribusi masing-masing tim dalam setiap pelaksanaan kegiatan forum, termasuk rapat atau pertemuan pengurus yang telah dilaksanakan selama ini hanya sebagian kecil saja tim yang aktif.

C. Pembahasan

Pada subjudul ini diuraikan data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 21 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, kepala bidang dan sub bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, kepala bidang pada Dinas Kesehatan, tim forum kabupaten sehat dan masyarakat yang ada di Kecamatan Nunukan. Data primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Pembahasan terhadap implementasi kebijakan difokuskan pada isi lingkungan kebijakan dengan acuan Teori Merille S Grindle, sedangkan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan difokuskan pada komunikasi dan sumberdaya dengan acuan teori George C. Edwar III dan teori Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn . Masing-masing bagian ini dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik dari sumber informasi maupun isi informasinya.

Kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan yang saat ini dilakukan adalah program yang mengarah kepada peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, di mana program tersebut di turunkan ke dalam 9 (sembilan) tatanan, yaitu: (1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; (2) Kawasan sarana lalu lintas tertib, pelayanan transportasi; (3) Kawasan industri dan perkantoran yang sehat; (4) Kawasan pariwisata sehat; (5) Kawasan pertambangan sehat; (6) Kawasan hutan sehat; (7) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri; (8) Ketahanan pangan dan gizi; (9) Kehidupan sosial yang sehat.

Kebijakan yang digulirkan dan dilaksanakan agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh *stakeholders* yang ada di antaranya kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, kepala Dinas Kesehatan, kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, tim forum kabupaten sehat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan konsekuensi agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Secara khusus, tanggung jawab ada pada tim forum kabupaten sehat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Implementasi Kebijakan Forum Kabupaten Sehat. Jadi kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini dapat dikatakan adalah tim forum kabupaten sehat dan Kepala OPD teknis lainnya dengan penanggung jawab adalah Bupati sebagai kepala daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya manfaat dan perubahan kearah yang lebih baik dari implementasi kebijakan terhadap tujuan-tujuan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan, menurut grindle (1980:11) bahwa kegiatan implementasi dimaksud dipengaruhi oleh : Isi Kebijakan dan Isi kebijakan tersebut meliputi : kepentingan yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, jenis-jenis manfaat atau tipe manfaat, derajat perubahan atau tingkat perubahan yang diinginkan, karakteristik penyusunan kebijakan dan sumberdaya yang tersedia. Hasil Kebijakan itu sendiri adalah dampak (*outcomes*) yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kebijakan dan seberapa besar pengaruh dan penerimaan masyarakat.

Hasil wawancara mendalam (*indepht interview*) kepada pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh :

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi atau yang terlibat

Kepentingan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau dengan kata lain siapa yang menjadi *stakeholders* dalam implementasi kebijakan program kabupaten sehat yang dilaksanakan, yang secara tertulis menjadi ketepatan dalam kebijakan. Kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diuraikan kedalam tujuan program, prioritas program dan rincian program ke dalam berbagai kegiatan. Tujuan program sampai rincian kegiatan secara jelas akan terlihat siapa-siapa yang terkait dalam setiap kegiatan dan tanggung jawab.

Menurut Grindle (1980:6) bahwa : secara umum, tugas implementasi kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang membantu tujuan-tujuan dari kebijakan publik agar terealisasi sebagai hasil aktivitas pemerintahan. Selanjutnya Grindle (1980: 7) mengatakan bahwa :

Kebijakan publik merupakan pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana yang diterjemahkan dalam program kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan berbagai program yang dapat dikembangkan dengan maksud mendatangkan perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program dan pemerintah.

Implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat tidak hanya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Dinas Kesehatan dan tim forkahat saja melainkan melibatkan beberapa instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi program kabupaten sehat adalah secara politikal mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi

permasalah-permasalahan Kabupaten Nunukan terutama masalah kesehatan saat ini dan yang akan datang, yaitu tentang peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan digulirkannya program-program pemerintah, untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan forum kabupaten sehat di lapangan adalah bagaimana program kabupaten sehat itu dijalankan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kabupaten sehat, yaitu tercapainya kondisi kota untuk hidup dengan aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah dengan perencanaan masing-masing, seperti yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1138/Menkess/PB/VIII/2005.

Kenyataan di lapangan bahwa program kabupaten sehat ini berjalan setiap tahun, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tim forum kabupaten sehat di dalam melaksanakan program tersebut porsi terbesar adalah terletak pada sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan sekolah-sekolah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan seperti kerja bakti jumat bersih dan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan akses sanitasi khususnya pembuatan jamban keluarga dari ban bekas sebagai septic tank. Sedangkan di dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45./513/VII/2015, telah diuraikan beberapa tugas pokok dan fungsi tim forum kabupaten sehat, yaitu

mendorong kemandirian masyarakat menciptakan lingkungan pemukiman dan perilaku hidup sehat, mengadakan pertemuan evaluasi upaya kegiatan kabupaten sehat secara interen, lintas sektor terkait dan forum komunikasi kecamatan sehat setiap triwulan, menyusun rencana penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan berdasarkan usulan masing-masing forum komunikasi kecamatan atau masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan 5 menyampaikan bahwa :

“ Kegiatan sosialisasi kabupaten sehat di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa minimal 2 kali dalam satu tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan ke sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat, selain itu dilakukan juga melalui media sosial dengan tujuan agar tercapai lingkungan sehat di Kabupaten Nunukan karena hidup sehat adalah merupakan tanggungjawab bersama dan kemauan bersama”.

Berdasarkan pernyataan di atas analisis peneliti bahwa program kabupaten sehat yang telah dilaksanakan oleh tim forum kabupaten sehat belum sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana tugas dan fungsi tim, yaitu mengadakan pertemuan evaluasi upaya kegiatan kabupaten sehat secara interen, lintas sektor terkait dan forum komunikasi kecamatan sehat setiap triwulan belum dilaksanakan dan juga menyusun rencana penyehatan kualitas lingkungan dan bangunan berdasarkan usulan masing-masing forum komunikasi kecamatan atau masyarakat belum dilakukan.

Hal tersebut di atas sesuai apa yang disampaikan oleh informan 10 bahwa

“Kegiatan yang dijalankan selama ini sudah ditetapkan, jadi kami hanya melaksanakan saja, dan kegiatan yang dijalankan bukan kami yang merencanakan”

Program kabupaten sehat dilaksanakan setiap tahun mulai Tahun 2012-2017, dengan tujuan untuk terselenggaranya upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya resiko penyakit dengan memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya yang ada secara mandiri. Melalui kebijakan forum kabupaten sehat diharapkan terwujudnya forum yang mampu menjalin kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. Keterpaduan program dan kegiatan kabupaten sehat merupakan kalimat yang sering diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang ada di masyarakat yang mendukung program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan adalah jumat bersih. Di tahun mendatang diharapkan banyak kegiatan yang dapat mendukung program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan tidak hanya oleh pemerintah akan tetapi oleh pihak swasta dan LSM sangat diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan jaringan yang bertujuan saling memberi informasi tentang dan pelaksanaan program kegiatan yang mendukung suksesnya program kabupaten sehat. Keaktifan forum kabupaten sehat dapat mengundang masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM dapat merupakan langkah awal terjadinya sinergitas kegiatan di masyarakat. Meningkatnya jejaring informasi dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah untuk menyukseskan upaya keterpaduan program kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

Hal tersebut di atas sesuai apa yang disampaikan oleh informan 2 bahwa

“Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi kebijakan forum kabupaten sehat khususnya program kabupaten sehat untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, hal ini terlihat semua masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan berupa pemberdayaan dan sosialisasi meskipun masih terbatas dan tidak semua kecamatan dapat dijangkau karena keterbatasan anggaran”.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan 10 yang secara teknis langsung bertanggung jawab penuh di dalam mensukseskan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan bahwa :

“Kalau berbicara kepentingan tidak ada karena semua diperlakukan sama, yang menjadi persoalan adalah masih banyak masyarakat yang hanya mau dibantu tapi tidak mau berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan sedangkan pekerjaan yang kami laksanakan sifatnya pemberdayaan, jadi harus ada kerjasama dari masyarakat”.

Sasaran program kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat yaitu kepada masyarakat Kabupaten Nunukan secara umum, hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh informan 11:

“Sasarannya tentunya masyarakat yang ingin dibantu dan mau meningkatkan kesehatan lingkungan dan keluarganya, sedangkan sosialisasi lebih difokuskan kepada anak sekolah dan masyarakat yang dinilai masih kurang sehat lingkungannya”.

2) Tipe manfaat

Hasil wawancara dengan informan 12, bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya sosialisasi program kabupaten sehat kepada masyarakat adalah :

“kami sangat merasakan manfaat dengan dilaksanakannya program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, karena program tersebut sudah disosialisasikan oleh tim forkahat sehingga kami lebih mengerti apa tujuan dan sasaran dari program tersebut. Jadi program tersebut sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi kesehatan baik lingkungan maupun kesehatan diri”.

Hal senada disampaikan oleh informan 14:

“Kami sangat terbantu dengan program ini dimana telah memberikan manfaat yang besar bagi anggota masyarakat yang ada di lingkungan RT kami. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki jamban keluarga dengan adanya bantuan dari tim forkahat berupa pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan jamban keluarga dari ban bekas untuk menjadi *septic tank*, sehingga masyarakat tidak buang air besar lagi di sembarang tempat. Selain itu masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat dan sekarang telah membuang sampah ditempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas analisis peneliti bahwa program kabupaten sehat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan telah memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan apakah program ini sudah tepat sasaran baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan informan 3 bahwa :

“Program kabupaten sehat yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 5 (lima) Tahun ini telah memberikan dampak yang cukup baik terutama dari sisi peningkatan kualitas kesehatan . Kami berharap agar Kabupaten Nunukan dapat menjadi kabupaten yang sehat sehingga nyaman dihuni oleh penduduknya dan terhindar dari resiko penyakit yang membahayakan. Dengan adanya program itu kami sangat mengharapkan adanya dukungan dan kerjasama dari segala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri, karena tanpa adanya dukungan dan kerjasama, maka program ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal.”

Lebih lanjut disampaikan oleh informan 2, bahwa :

“ Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh forum kabupaten sehat setiap tahun sudah tepat dan dalam pelaksanaannya melibatkan langsung masyarakat dan pihak swasta baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan”.

Analisis peneliti dari pernyataan di atas adalah dengan dilaksanakannya program kabupaten sehat melalui sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat tersebut telah memahami dengan baik pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kesehatan lingkungannya dan kesehatan keluarganya. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan karena hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, yaitu partisipasi birokrasi yang terlalu besar dapat menyebabkan forum kabupaten sehat tidak mempunyai wewenang sehingga tidak mempunyai inisiatif dalam melakukan pekerjaan. Kurangnya sosialisasi tentang gerakan kabupaten sehat dapat menyebabkan partisipasi dan inisiatif masyarakat terbatas. Selain itu yang terpenting adalah tersedianya sumberdaya lokal, karena keberhasilan program kabupaten sehat harus didukung dengan besarnya kesadaran akan pentingnya arti kabupaten sehat dan dukungan dari semua pihak.

Manfaat dengan adanya program kabupaten sehat yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat memahami pola hidup bersih dan sehat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, namun ada sebagian masyarakat yang masih belum memahami pola hidup bersih dan sehat sehingga masih enggan untuk menjaga kesehatannya dan lingkungannya. Selain manfaat tersebut Implementasi

Kebijakan Program kabupaten sehat sudah tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang mau merubah pola hidupnya, yaitu pola hidup bersih dan sehat, hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 6, bahwa :

“Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat yang ingin membantu dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan lingkungannya, karena bantuan yang diberikan harus ada kerjasama dari masyarakat penerima bantuan, dengan kata lain bantuan tersebut berupa pemberdayaan. Akan tetapi kami terus berusaha agar semua masyarakat yang kami anggap perlu meningkatkan kesehatannya kami akan dorong untuk mau bekerjasama secara sukarela sehingga mereka dapat berperilaku hidup bersih dan sehat seperti yang lainnya. Sosialisasi lebih difokuskan kepada masyarakat yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat”.

Selama ini telah dilakukan penekanan pada kelompok sasaran dalam program kabupaten sehat untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan bersih dan saat ini sudah tepat, dimana sosialisasi tentang peningkatan kualitas kesehatan lingkungan sudah menyentuh sampai ke masyarakat di setiap kecamatan serta pemberian bantuan berupa pemberdayaan juga diberikan hanya kepada masyarakat yang mau bekerjasama saja tetapi masih dalam kapasitas yang terbatas hal ini dipengaruhi banyak hal, yaitu kemampuan keuangan yang juga terbatas sehingga dilakukan secara bergiliran, hal ini dikarenakan masih banyak warga masyarakat yang tidak memiliki jamban keluarga.

3) Derajat perubahan yang diharapkan

Perubahan yang akan diwujudkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi *Stakeholders* atau kepentingan yang terlibat di dalam implementasi kebijakan forum kabupaten sehat, yaitu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, tim forum kabupaten sehat, serta Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Keberhasilan perubahan yang diharapkan melalui implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat perlu didukung personil yang berkompeten dibidangnya, sarana dan prasarana serta koordinasi antar instansi pelaksana, partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta yang ada.

Arah perubahan implementasi kebijakan forum kabupaten sehat dimaksudkan untuk mewujudkan forum yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta mampu menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. Serta keefektifan dan efisiensi semua tim di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pemberdayaan dan mengoptimalkan fungsi dan peran *stakeholders* yang ada di dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan.

Menurut informan 2, dengan dilaksanakan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang terkait adalah:

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi tentunya pemerintah menginginkan adanya perubahan pandangan dari masyarakat bahwa kesehatan perlu dijaga dan ditingkatkan, karena kawasan yang sehat adalah kondisi wilayah yang bersih, nyaman dan aman sehat bagi warganya untuk dihuni”.

Analisis peneliti dari pernyataan di atas adalah dengan dilaksanakannya program kegiatan kabupaten sehat melalui sosialisasi/pembinaan serta pemberian bantuan dan pendampingan oleh tim forum kabupaten sehat, maka sebagian masyarakat telah memahami perlunya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan harapan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan dapat hidup sehat dan terbebas dari segala macam penyakit.

Lebih lanjut dikatakan informan 4 bahwa:

“Kami berharap bahwa masyarakat yang sudah mendapat bantuan dan diikutkan dalam sosialisasi dapat terus menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya, dan kami sangat berharap mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain akan pentingnya arti kesehatan”.

Peran pemerintah saat ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, dimana bentuk perhatian Pemerintah Daerah melalui tim forum kabupaten sehat telah memberikan dan menjembatani antara dinas/instansi pemerintah dengan masyarakat. Salah satu contoh bahwa masyarakat yang bergelut di sektor perikanan khususnya budidaya rumput laut misalnya untuk pemasaran maka pemerintah perlu turun tangan untuk mencari solusi khususnya harga yang tidak dipermainkan oleh tengkulak.

Lebih lanjut dikatakan oleh informan 5 bahwa:

“Perubahannya yang paling kami harapkan dan memang sudah ada kelihatan itu adalah pelaksanaan jumat bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga pelaksanaan olah raga bersama setiap minggu yang diadakan dialun-alun yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan”.

Penyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus terus mendorong pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan terus dan tidak berhenti ditengah jalan. Karena melihat dukungan masyarakat yang ada sekarang cukup bagus terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

4) Letak pengambilan keputusan

Terkait dengan perencanaan program kabupaten sehat yang dilaksanakan, dari hasil wawancara dengan informan 2 menyampaikan bahwa :

“ Program kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan direncanakan setiap Tahun sejak Tahun 2012 sampai sekarang. Adapun program kegiatan yang dijalankan saya rasa sudah tepat sasaran, dimana sasaran yang paling diutamakan adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan yang dianggap masih kurang layak untuk dihuni, maksudnya dari sisi kesehatan masih kurang. Selain itu masyarakat yang dibantu diutamakan bagi masyarakat yang mau bekerjasama karena bantuan yang diberikan berupa pemberdayaan, jadi masyarakat juga harus terlibat langsung ”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, analisis peneliti bahwa pemerintah beserta tim forum kabupaten sehat bertindak tegas di dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, artinya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh di dalam sebuah kebijakan program terutama program kabupaten sehat yang tujuannya untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat yang dijalankan secara teknis oleh tim forum kabupaten sehat yang merupakan pelaksana teknis di lapangan yang langsung mengimplementasikan program kabupaten sehat melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh informan 3 yang menyatakan bahwa “ kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya direncanakan di dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.”

Terkait penyampaian laporan pertanggungjaawaban pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil penelitian bahwa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh tim forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan secara rutin disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Analisis peneliti dari pernyataan di atas bahwa secara teknis kegiatan kabupaten sehat sudah mengikuti mekanisme perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 20108 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5) Pelaksana Program

Untuk melaksanakan program terutama pelaksana program implementasi kebijakan wajib dilaksanakan oleh aparatur yang sesuai kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diharapkan. Pemimpin setiap unit kerja hendaknya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan para

pelaksanaanya mempunyai keterampilan yang dibutuhkan baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Pelaksana implementasi kebijakan senantiasa diawali oleh pimpinan pemerintah sebagai agensi eksekutif. Menurut Nugroho (2009:649) bahwa empat pilihan pelaksana implementasi yang sesungguhnya, yaitu :

- a) Pemerintah, meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed*, atau berkenan dengan eksistensi negara bangsa.
- b) Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Hal ini termasuk pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah ditingkat masyarakat.
- c) Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang *societed driven policy*. Hal ini termasuk kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi pemerintah.
- d) Masyarakat sendiri, yang disebut *people (atau provate) driven policy*. Termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Berdasar pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa siapa saja yang melaksanakan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan adalah merupakan pelaku utama atau sebagai *government driven policy*. Jika kita diuraikan, maka para pelaksana kebijakan forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,

Dinas Kesehatan beserta aparaturnya bidang Sosial dan Pemerintah dan Bidang Kesehatan Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terkait, tim Forum Kabupaten Sehat (Forkahat), perangkat kecamatan dan masyarakat yang merupakan obyek utama di dalam implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Hasil wawancara dengan responden 5 menyampaikan bahwa :

“ Dalam kiprahnya, sejak forum ini terbentuk telah banyak hal-hal yang dilakukan terkait dengan penciptaan suasana yang mendukung dan menunjang tercapainya keberhasilan menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat. Secara manajemen yang telah dilakukan oleh tim forum kabupaten sehat (forkahat) adalah mengkonsolidasikan organisasi, melakukan pembagian tugas dan kewenangan mulai dari pengurus inti sampai keanggota tim. Selain itu dilakukan upaya untuk menggerakkan Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan Pokja di tingkat desa/kelurahan dengan melakukan pembinaan secara rutin setiap tahun.”

Pendapat tersebut senada dengan penyampaian informan 6 bahwa :

“ Secara administratif forkahat berusaha memfungsikan diri sebagai organisasi yang baik, yakni dengan menginventarisir segala permasalahan yang dihadapi forum, pendataan dan penetapan program yang sesuai serta melakukan **monitoring** dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan Pokja di tingkat desa/kelurahan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim forum kabupaten sehat (forkahat) sudah berjalan sesuai dengan pedoman umum program kabupaten sehat terutama dalam hal pembinaan kepada forum kabupaten sehat di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang tidak menjalankan prinsip-prinsip kabupaten sehat. Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:7) bahwa keberhasilan suatu

proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcomes*) tergantung kepada kegiatan program yang telah didesain dan pembiayaan yang memadai.

Lebih lanjut dikatakan oleh informan 5, bahwa para pelaksana implementasi kebijakan program kegiatan kabupaten sehat telah melibatkan aparatur pelaksana yang ada :

“SDM kami sudah kami maksimalkan termasuk tim forum komunikasi desa/kelurahan di setiap kecamatan, namun saat ini tim tersebut belum bekerja secara maksimal. Rencana ke depan kami akan merevisi kembali pengurus yang dianggap tidak loyal dan tidak bisa bekerja secara maksimal untuk membantu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kecamatan-kecamatan. Memang kami akui dari sisi kompetensi kami lemah atau terbatas, kami memerlukan SDM yang memiliki loyalitas yang tinggi dan mau bekerja secara sukarela karena itu sangat penting di dalam melakukan pembinaan ke masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dianalisis bahwa untuk menjalankan ke sembilan tatanan yang ada dalam program kabupaten sehat selama 5 (lima) Tahun hanya dapat menjalankan empat tatanan yang dilakukan hanyalah bersifat pembinaan, sosialisasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan tidak semua masyarakat dilibatkan. Hal ini disebabkan karena para pelaksana di lapangan menemui beberapa kendala, yaitu anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya loyalitas oleh aparatur pelaksana di bawah (tim forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan), peningkatan loyalitas dan kemauan bekerja secara sukarela bagi semua anggota tim forum kabupaten sehat baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan sangat diharapkan mengingat mereka merupakan pelaksana implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma, standar dan ketentuan peraturan yang ada.

Kemudian faktor eksternalnya adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, hal ini terlihat, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, buang air besar di sembarang tempat dan merokok di sembarang tempat dan masih ada beberapa masyarakat yang sulit untuk diarahkan apabila ada kegiatan jumat bersih, masih ada masyarakat yang tidak mau turut berkontribusi. Hal tersebut diakibatkan karena pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat yang masih rendah. Peran serta dinas/kantor teknis terkait untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan secara khusus kegiatan kebersihan lingkungan langsung di lapangan sangat diharapkan.

6) Sumberdaya yang dilibatkan

Sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan program kabupaten sehat, diantaranya sumberdaya manusia yang memiliki kemauan dan loyalitas yang tinggi di dalam bekerja beserta perangkat dan *stakeholders* Organisasi Perangkat Daerah (dinas/kantor), tim forum kabupaten sehat, sumberdaya anggaran yang merupakan pendukung utama di dalam menjalankan sebuah kebijakan program kabupaten sehat, standar atau norma yang berlaku yang merupakan sumberdaya informasi serta sarana dan prasarana di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Keberhasilan program kabupaten sehat tidak terlepas adanya dukungan dari staf pelaksana pada kegiatan kabupaten sehat. staf pelaksana pada kegiatan kabupaten sehat di tingkat kabupaten adalah tim pembina dan tim forum kabupaten sehat Kabupaten, Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan dan pokja di tingkat desa/kelurahan, tim pembina dan

tim forkahat kabupaten tersebut ditetapkan oleh Bupati dan Forum Komunikasi Desa (FKD) dan pokja di tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh forum kabupaten sehat kabupaten .

Jumlah tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan sebanyak 34 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris dan wakil sekretaris, 1 orang bendahara, 4 orang ketua bidang, 4 orang sekretaris bidang dan 20 orang anggota. Secara garis besar, tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan yang menyelenggarakan program kabupaten sehat terdiri atas :

Pelindung/Penasehat	: Bupati dan Wakil Bupati
Pengarah	: Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang administrasi dan Kepala Bappeda dan Litbang
Ketua	: Unsur masyarakat
Wakil Ketua	: Unsur masyarakat
Sekretaris	: Unsur pemerintah
Wakil Sekretaris	: Unsur pemerintah
Bendahara	: Unsur masyarakat

Struktur di atas dilengkapi pula dengan bidang-bidang, yaitu bidang kesehatan lingkungan dan fisik, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi dan pengembangan wilayah dan bidang data dan hubungan masyarakat. Memperhatikan struktur kepengurusan forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka dapat memberikan gambaran bahwa mereka yang menempati jabatan-jabatan strategis dalam struktur organisasi ini adalah berasal dari unsur pemerintah, demikian pula pada beberapa anggota masing-masing bidang. Selanjutnya ketua, wakil ketua,

bendahara, ketua masing-masing bidang dan sebagian besar anggota bidang berasal dari unsur masyarakat, LSM, swasta, dan unsur media. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Nama Anggota Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

No	Nama	Jabatan
1	Tamrin	Ketua Forkahat
2	H.M. Aidi Hendrik, SE.MM	Wakil Ketua I
3	Drs. RH. Simanjuntak	Wakil Ketua II
4	Hj. Ramsidah, SKM, MM	Sekretaris
5	Hj. Hasmiah, S.Pt	Wakil Sekretaris
6	M. Busrah	Bendahara
7	Syamsuddin	Ketua. Bid. Ekonomi dan Peng. Wilayah
8	Hamida Rita	Ketu Kesehatan Ling. Dan Fisik
9	Ruhasman	Ketua Bid. Sosial dan Budaya
10	Asri	Ketua. Bid. Data dan Hub. Masyarakat
11	Arief Budiman, S.Pt	Sekretaris Bid. Ekonomi dan Peng. Wilayah
12	Abdul Mukti, ST	Sekretaris Kesehatan Ling. Dan Fisik
13	Suryo Irwanto, SP	Sekretaris Bid. Sosial dan Budaya
14	M. Chaerizal, ST	Sekretaris Bid. Data dan Hub. Masyarakat
15	Rahmatullah, A.md	Anggota tim
16	Supratman, AMKL	Anggota tim
17	Salmah, AMKL	Anggota tim
18	Darsa	Anggota tim

19	Akbar	Anggota tim
20	Syrifuddin, Amd, Kep.	Anggota tim
21	Sriwati Arzan, SKM	Anggota tim
22	Abd. Samad	Anggota tim
23	Sugeng	Anggota tim
24	Agus Fahri	Anggota tim
25	Mirawati, AMKL	Anggota tim
26	Budianto Matto	Anggota tim
27	Mikael L. Watun	Anggota tim
28	Muh. Delvian NM, S.Sos	Anggota tim
29	Nurasia	Anggota tim
30	Marhuma	Anggota tim
31	Asriawan	Anggota tim
32	Sudarno	Anggota tim
33	Norasima	Anggota tim
34	Delita	Anggota tim

Sumber : Forkahat Kabupaten Nunukan 2017

Sumberdaya manusia yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang didukung oleh aparatur dinas/kantor terkait, tim forum kabupaten sehat yang selalu membina kegiatan masyarakat di lapangan. Sumberdaya tersebut haruslah memiliki loyalitas yang

tinggi dan kemauan bekerja secara sukarela di dalam menjalankan program kabupaten sehat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders*. Oleh karena itu setiap unit kerja tentunya harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf pelaksana yang dibutuhkan.

Dengan jumlah penduduk (177.607), jumlah kecamatan 19, jumlah desa dan kelurahan 240, dan luas wilayah 14.247,5² dengan dengan kondisi demografi wilayah yang sulit tentunya dibutuhkan jumlah personil yang cukup dengan kemampuan yang memadai. Tim forum kabupaten sehat sendiri hanya memiliki 43 orang anggota di dalam mengimplementasikan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Sulitnya jangkauan lokasi masing-masing wilayah kecamatan merupakan tantangan tersendiri di dalam melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan di lapangan membuat program tersebut membutuhkan sumberdaya yang baik dan sumber anggaran yang besar. Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaan implementasi kebijaksanaan. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

Sumberdaya yang tersedia dan yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara kualitas dan kuantitas harus terpenuhi, jika tidak tersedia, maka program yang diarahkan untuk menuju perubahan yang lebih baik akan terhambat. Sehingga waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harapan dari penerima pelayanan. Sumberdaya aparatur dan sumberdaya lain sebagai pendukung implementasi kebijakan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan organisasi sesuai standar yang ada. Sumberdaya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan suatu kebijakan secara umum meliputi : jumlah personil yang didukung dengan kompetensi dasar pendidikan dan keterampilan, jumlah sarana dan prasarana, besaran pembiayaan serta mekanisme kerja secara jelas.

Tim pembina sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap tim forum kabupaten sehat baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, tetapi intensitasnya masih sangat kurang. Hal ini dapat di lihat pada indikator dilibatkannya pengurus forum kabupaten sehat untuk mengikuti studi banding ke Kota Pekalongan pada Tahun 2012 dan ke Kota Bontang pada Tahun 2014. Tujuan dari studi banding tersebut untuk dapat melihat secara langsung aktivitas pengurus forkat di Kota Pekalongan dan Kota Bontang dalam menyelenggarakan program-program kabupaten sehat. Melalui kegiatan ini diharapkan tim forum kabupaten sehat dapat belajar dan selanjutnya dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan.

Sumberdaya sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan. Sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap program kabupaten sehat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai pelaksana pembinaan dan pendampingan di lapangan harus memiliki sumberdaya yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, mengingat tim forum kabupaten sehat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Implementasi tim forum Kabupaten sehat di kabupaten Nunukan diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat Hal tersebut juga disampaikan oleh informan 8 bahwa :

“Keaktifan tim forum komunikasi desa/kelurahan disetiap kecamatan-kecamatan sangat diharapkan sehingga akan memudahkan pelaksanaan sosialisasi kepada ketua RT, kader posyandu, PKK, tokoh masyarakat, selain itu dapat melakukan kerjabakti jumat bersih untuk menciptakan desa/kelurahan sehat yang mendukung terciptaya kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan”.

Selanjutnya informan 12 mengatakan bahwa :

“ Sumberdaya yang ada dalam tim forum kabupaten sehat sudah cukup banyak, namun selama terbentuknya tim tersebut belum pernah diberi pelatihan untuk peningkatan SDM, terutama pelatihan tentang pengelolaan organisasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan”.

Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa tim forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan bertujuan baik, yaitu ingin benar-benar memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang ada untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembinaan kepada masyarakat bertujuan supaya yang hidup di dalam lingkungan, sehat, dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang diberikan sehingga dapat mengerjakan dan menguasai bidang kerjanya dengan baik.

Akan tetapi tim forum kabupaten sehat kabupaten menghadapi hambatan dalam hal minimnya anggaran serta pemahaman sumberdaya manusia pelaksana yang masih kurang untuk melaksanakan pembinaan tersebut sehingga perlunya pendampingan yang lebih intensif sehingga tujuan akhirnya diharapkan masyarakat

yang memperoleh pembinaan, pendampingan di lapangan akan semakin mandiri dan mempunyai kemauan dan perhatian dalam hal pemeliharaan kesehatan.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan terutama dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Efektif atau tidaknya suatu implementasi apabila para pembuat keputusan sudah memahami apa yang akan dilakukan. Pemahaman ini dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu setiap keputusan kebijakan yang diambil harus ditransmisikan atau dikomunikasi dengan baik kepada orang yang tepat. Untuk mengatur keberhasilan komunikasi, maka terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan, yaitu :

1) Transmisi

Komunikasi menunjukkan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator, pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam komunikasi variabel yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kabupaten di Kabupaten Nunukan adalah variabel transmisi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan telah terjadi perbedaan informasi antara pelaksana teknis dengan informan yang ada, perbedaan ini terjadi karena proses transmisi atau penyaluran informasi berupa pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu permasalahan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah kurangnya intensitas dan jangkauan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, hal ini akibat luasnya wilayah kerja dan rendahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2014:151) menyatakan bahwa :

“ Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Yang sering terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan”.

Sesuai dengan pendapat tersebut bahwa proses transmisi belum berjalan dengan baik dan sebagai bahan perbaikan, maka solusi yang akan dapat diambil untuk perbaikan ke depannya adalah dengan meningkatkan jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan di tingkat kecamatan atau kelurahan serta melibatkan semua kelompok masyarakat yang ada serta meningkatkan jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat.

2) Kejelasan

Kejelasan yang dimaksudkan disini adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan

merupakan salah satu faktor agar implementasi tersebut dapat diterima dengan baik, bila pesan yang disampaikan sangat jelas, maka tidak membuat salah interpretasi suatu pesan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program kabupaten sehat, tim forum kabupaten sehat dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat terakit dengan penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, sudah diterima dengan jelas oleh masyarakat.

Hal tersebut terbukti bahwa dari salah seorang penerima bantuan sudah paham sekali akan kewajibannya bahwa bantuan yang diberikan harus ada dukungan dari penerima bantuan karena sifatnya hanya pemberdayaan, walaupun pada awalnya masih menghadapi berbagai permasalahan namun setelah dijelaskan dan didampingi maka masyarakat yang menerima bantuan paham akan hak dan kewajibannya.

Dengan adanya tim forum kabupaten sehat ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat maka, perintah dari kebijakan yang akan disampaikan akan lebih cepat dan efektif.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:180) mengungkapkan bahwa :

“ Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan ”.

Lebih lanjut Edward III (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:181)

menjelaskan bahwa :

“Dalam rangka mengurangi kadar ketidakjelasan komunikasi kebijakan, maka jauh lebih baik jika dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik dikembangkan saluran-saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-perintah implementasi, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah ini diteruskan dengan benar”.

3) Konsistensi

Apabila kita mengharapkan pelaksanaan implementasi berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Karena perintah yang sering berubah-ubah akan membingungkan para pelaksana kebijakan, akan tetapi perintah yang tidak konsisten juga akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Apabila ini terjadi, maka mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat sudah berjalan sekitar kurang lebih 5 (lima) Tahun, dan arahan berupa hak dan kewajiban yang disampaikan kepada penerima manfaat tetap berpedoman pada Pedoman penyelenggaraan kabupten sehat. Hasil wawancara dengan informan, maka dapat diketahui bahwa selama ini, ada anggota tim forum yang aktif dan mendominasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan anggota yang lainnya kurang aktif atau kurang berpartisipasi. Beberapa tim forkahat mengatakan bahwa sebetulnya semua anggota tim mau bekerja secara aktif akan tetapi kurang difungsikan dan bahkan ada di antara anggota tim yang tidak tahu mau bekerja apa.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:151) menjelaskan bahwa :

“ Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Lebih lanjut diuraikan bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan”.

Beberapa faktor pendukung terkait komunikasi tersebut adalah :

- a) Informasi yang disampaikan oleh tim forum kabupaten sehat kepada masyarakat terkait pelaksanaan program kabupaten sehat sudah sangat jelas di mengerti oleh masyarakat pada umumnya.
- b) Ketentuan tentang penyelenggaraan kabupaten sehat yang disampaikan oleh tim forum kabupaten sehat sudah konsisten dan tidak berubah-ubah.

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi forum kabupaten sehat yang berhubungan dengan komunikasi adalah masih kurangnya koordinasi diantara selama anggota tim sehingga mengakibatkan aktivitas organisasi tidak dapat berjalan efektif dan efisien yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja tim forum kabupaten sehat selama ini. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pelaksanaan pertemuan antara tim pembina forum kabupaten dengan tim forum kabupaten sehat untuk membicarakan program kegiatan kabupaten sehat dan menyusun strategi yang tepat dan efektif dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat masih sangat kurang, sehingga komunikasi antara tim pembina dan tim forum kabupaten sehat masih relatif rendah. Hal ini dapat menjadi

faktor penghambat dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dan kesadaran untuk bersama-sama antara tim pembina dan tim forum kabupaten sehat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab yang tinggi.

Aktivitas pembinaan oleh tim forkahat terhadap pengurus forum komunikasi desa di kecamatan masih sangat kurang, sehingga sinkronisasi dan koordinasi untuk menyelenggarakan kegiatan belum terlaksana secara maksimal. Selain itu pelaksanaan sosialisasi forum kabupaten sehat pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa masih kurang. Pelaksanaan sosialisasi forum kabupaten sehat hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun di Ibu kota kabupaten sedangkan di luar ibu kota kabupaten tidak bisa dilakukan walaupun hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun ini, hal ini disebabkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan atau di kelurahan/desa. Selain itu penyusunan program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tidak melibatkan semua anggota tim, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini masih bersifat tidak terencana dan tidak terarah.

Kurangnya pelaksanaannya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan masih ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak mengetahui program kabupaten sehat yang sudah dicanangkan, walaupun masyarakat secara tidak langsung telah mendukung program kabupaten sehat antara lain kegiatan jumat bersih. Masalah umum lainnya adalah belum adanya kerjasama lintas sektor yang baik. Tidak semua kecamatan terbentuk Forum Komunikasi Desa (FKD), selain itu antara anggota pengurus FKD sendiri belum ada keterpaduan dalam persepsi dan pelaksanaan

kegiatan. Masih banyak anggota Forum Komunikasi Desa (FKD) yang berpendapat bahwa program kabupaten sehat adalah tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan saja, sehingga program kabupaten sehat belum sepenuhnya dilaksanakan. Pelaksanaan program kabupaten sehat yang sudah dilaksanakan masih terfokus pada upaya kuratif daripada promotif dan preventif. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa pihak kecamatan/kelurahan dan desa di luar ibu kota kabupaten tidak memahami secara keseluruhan tentang pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat dibutuhkan peningkatan dukungan pemerintah daerah, termasuk pihak legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah ini, dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat melalui berbagai usaha dan kebijakan, terutama berkaitan dengan kebijakan pengalokasian anggaran atau biaya untuk pelaksanaan program kegiatan pada instansi/dinas yang masuk anggota tim pembina forum kabupaten sehat. Relatif kurangnya program kegiatan yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pembiayaan program dan kegiatan yang termasuk dalam program kabupaten sehat dapat menghambat pelaksanaan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Selain itu perlunya peningkatan koordinasi antar OPD tim pembina forum kabupaten sehat dan juga tim pembina dengan tim forum kabupaten sehat, sehingga kinerja tim tersebut dapat meningkat yang selama ini masih dianggap rendah.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Manusia adalah sumberdaya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Di dalam setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Van Mater dan Van Horn (dalam Agustino, 2014) menegaskan bahwa :

“ Sumberdaya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Terbatasnya atau minimnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan faktor terbesar ketidakberhasilan implementasi kebijakan”.

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan ada beberapa indikator sumberdaya, yaitu :

a. Staf

Staf merupakan sumberdaya yang utama dalam pelaksanaan suatu implementasi. Ketersediaan staf yang memadai serta memiliki loyalitas yang tinggi dalam bekerja akan memudahkan pelaksanaan implementasi di lapangan. Program kabupaten sehat merupakan program yang membutuhkan staf yang memiliki loyalitas tinggi dalam bekerja karena bersentuhan langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang yang beragam.

Jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan 177.607 dengan luas wilayah 14.247,5 km² , dan tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan menjadi tantangan

tersendiri bagi tim forum kabupaten sehat untuk dapat hadir dalam melakukan pertemuan-pertemuan langsung dengan seluruh masyarakat, sementara jumlah tenaga tim forum kabupaten sehat hanya 34 orang. Walaupun telah dibentuk tim forum komunikasi desa di tingkat kecamatan, akan tetapi tim dari forum tersebut belum bisa bekerja secara maksimal, dengan demikian maka beban kerja dari tim forkahat kabupaten akan semakin berat.

Temuan lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tim forum kabupaten sehat adalah terkait dengan rendahnya gaji atau upah yang diterima oleh mereka, di samping itu dalam pelaksanaan di lapangan tidak adanya dana operasional dan seringkali gaji/atau upah yang mereka terima digunakan untuk pelaksanaan operasional di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh informan 8 bahwa : “ Dalam pelaksanaan di lapangan, dana operasional kami sangat minim, sehingga kami kadang gunakan gaji untuk biaya operasional ke lapangan”.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2014:151) menyampaikan bahwa : “ Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-administrators yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja mereka yang rendah”.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber kedua yang penting dalam pelaksanaan kebijakan implementasi. Pelaksana implementasi kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu semua

pelaksana kebijakan harus diberikan petunjuk sebelum melaksanakan kebijakan. Terutama mengenai informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim forum kabupaten sehat bentuk informasi yang digunakan adalah pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat. Dalam pedoman tersebut termuat tentang apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana melaksanakan kegiatan kabupaten sehat tersebut.

Dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa selama ini dalam penyusunan rencana kerja dilakukan tidak dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim forkahat. Oleh karena itu, pada umumnya kegiatan yang dilakukan selama ini hanyalah merupakan kegiatan yang sifatnya insidental, yaitu kegiatan dinas kesehatan yang melibatkan anggota forum kabupten sehat.

Berkaitan dengan informasi tersebut di atas, Edward III (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2014:151) menyampaikan bahwa :

“ Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Implementor* harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan, kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. *Implementor* harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum”.

Dari uraian di atas penulis analisis bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan, maka tim forum kabupaten sehat harus lebih mandiri dalam merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

c. **Wewenang**

Wewenang yang dilaksanakan oleh para pelaksana kegiatan forum kabupaten sehat akan mengefektifkan kebijakan implementasi yang akan diterapkan. Setiap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam kegiatan forum kabupaten sehat memiliki wewenang secara berjenjang, seperti tim forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan melakukan kegiatan lalu dilaporkan kepada tim forum kabupaten sehat yang ada di kabupaten. Sementara tim forkahat kabupaten berwenang dalam melakukan analisis dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat di wilayahnya dan bidang data pada tim forum kabupaten sehat melakukan analisis terhadap hasil verifikasi dan validasi tim forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan .

Penjelasan ini diperkuat pendapat Edward III dalam Agustino (2014:152) bahwa :

“ Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan”.

d. **Fasilitas**

Fasilitas merupakan variabel dari sumberdaya yang penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan adalah fasilitas. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat, pemerintah diwajibkan menyediakan sarana berupa kantor sekretariat beserta fasilitas pendukungnya baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat tim pembina forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan sementara masih bergabung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Meskipun telah ada papan nama di depan kantor Badan Perencanaann Pembangunan Daerah dan Litbang, tetapi belum ada ruangan tersendiri yang disediakan sebagai sekretariat tim pembina dan hanya di ruangan rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan, sehingga belum wadah pusat komunikasi dan koordinasi, baik sesama organisasi perangkat daerah yang masuk sebagai tim pembina maupun antara tim pembina dengan forum kabupaten sehat (forkahat).

Penempatan sekretariat tim pembia di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sudah tepat karena posisi tersebut, maka OPD yang terlibat sebagai tim pembina dapat lebih maksimal dalam tugas penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam program kabupaten sehat mengingat bahwa penyelenggaraan program kabupaten sehat merupakan tugas lintas sektor. Sekretariat tim pembina harus memiliki ruangan khusus untuk dijadikan tempat untuk berdiskusi, menyusun program kegiatan dan rencana aksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Jika sekretariat tersebut berada pada Dinas Kesehatan atau dinas/kantor lain, maka OPD lain dapat saja beranggapan bahwa program kabupaten sehat ini merupakan milik dari dinas/kantor bersangkutan.

Untuk sekretariat tim forum kabupaten sehat tingkat kabupaten sudah ada akan tetapi sekretariat tim forum komunikasi tingkat kecamatan sampai saat ini

belum ada dan masih menumpang di kantor kecamatan. Belum adanya sekretariat yang disediakan secara khususnya dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada, maka membuat pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat tidak berjalan secara efektif, khususnya pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Kita ketahui semua bahwa peranan sekretariat sangat besar karena merupakan tempat atau wadah bagi tim untuk melakukan aktivitas dalam rangka penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan dan tempat pertemuan dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan program kabupaten sehat di kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungannya dengan sumberdaya dan pelaksanaan program kabupaten sehat, terdapat beberapa pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut adalah :

- a) Tersedianya jumlah staf yang memiliki loyalitas dan pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- b) Adanya pedoman umum pelaksanaan program kabupaten sehat sebagai pedoman bagi tim forum kabupaten sehat dalam melaksanakan kegiatan program kabupaten sehat.
- c) Adanya wewenang dari tim forum kabupaten sehat dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap data masyarakat.

Faktor penghambat dalam hal sumberdaya ini adalah tidak adanya kantor sekretariat tim forum komunikasi desa/kelurahan pada tingkat kecamatan, sehingga pada tahap pelaksanaan di lapangan tidak maksimal. Tim forum komunikasi desa/kelurahan tingkat kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan program

kabupaten sehat karena tim ini akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu tingkat keaktifan anggota forum komunikasi desa masih cukup rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi anggota forum komunikasi desa masih relatif rendah. Dari semua anggota forum komunikasi desa hanya sebagian kecil yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat di tingkat kecamatan di masing-masing wilayah.

Tugas dan tanggungjawab tim forum komunikasi desa/kelurahan tingkat kecamatan secara umum adalah mensosialisasikan program kabupaten sehat. Selain itu tim forum komunikasi desa/kelurahan wajib melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang berorientasi bagaimana menciptakan dan mendukung suksesnya program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan. Wilayah kerja dari tim forum komunikasi desa/kelurahan meliputi seluruh kelurahan/desa dalam satuan wilayah kerja kecamatan. Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, maka sekretariat tim forum komunikasi desa/kelurahan di kecamatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau gagalnya dari kegiatan program kabupaten sehat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Edward III (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2014:152) menyampaikan bahwa :

“Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. *Implementor* mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil”.

Selain itu kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang sangat luas dan berada pada wilayah perbatasan, terpencil dan teringgal mengakibatkan beberapa

wilayahnya tidak dapat diakses dengan sarana transportasi dengan mudah, bahkan ada sebagian wilayahnya hanya dapat diakses dengan menggunakan pesawat perintis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan belum berjalan lancar, hal ini disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat belum sesuai dengan isi kebijakan, dimana pelaksanaan kegiatan dan pelaporan belum berjalan dengan baik dan Perencanaan kegiatan Tim Forum Kabupaten Sehat di masing-masing wilayah di Kabupaten Nunukan belum bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kabupaten sehat belum tercapai, yaitu belum tercapainya kondisi Kabupaten Nunukan untuk hidup dengan aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga belum dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat di Kabupaten Nunukan, yang meliputi :
 - a. Faktor-faktor yang mendukung kegiatan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sumberdaya manusia di dalam Tim Forum Kabupaten Sehat yang berasal dari berbagai golongan dan tingkat pendidikan dari berbagai jenjang;
 - 2) Adanya pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat;
 - 3) Adanya dukungan dana dari pemerintah.
- b. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan adalah :
- 1) Pelaksanaan sosialisasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa sangat kurang, disebabkan karena wilayah Kabupaten Nunukan sangat luas dan terdiri beberapa pulau sehingga dalam menjangkau pada daerah-daerah tertentu memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, sedangkan dana yang tersedia baik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan di Tim Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nunukan sangat terbatas. Kurangnya sosialisasi tentang gerakan kabupaten sehat menyebabkan partisipasi dan inisiatif masyarakat terbatas;
 - 2) Belum tersedianya kantor Sekretariat Forum Komunikasi Desa (FKD) tingkat Kecamatan dan Pokja di tingkat Desa/Kelurahan, yang mendukung bekerjanya pengurus. Tempat pertemuan masyarakat untuk mendiskusikan ide dan langkah yang akan diambil dalam mensukseskan gerakan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan juga belum tersedia;

- 3) Belum fokusnya pembinaan yang dilakukan oleh tim forum kabupaten sehat terhadap kegiatan yang ada di lapangan, seperti pembinaan terhadap pasar, sehingga penataan dan kebersihan pasar masih kurang;
- 4) Masih sulitnya untuk merubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan melibatkan dalam kegiatan kerjabakti atau gotong royong setiap jumat.

B. SARAN

Sesuai hasil penelitian Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan, maka agar pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat dapat berjalan secara maksimal, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar sosialisasi forum kabupaten sehat dilaksanakan secara maksimal sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, sehingga Pemerintah Daerah perlu menambah anggaran dan perlunya dukungan dana dari pihak swasta.
2. Pelaksanaan kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan harus mengutamakan proses daripada target.
3. Pemerintah daerah dapat menyediakan kantor sekretariat tim forum komunikasi desa di tingkat kecamatan dan pokja di tingkat desa/kelurahan
4. Tim forum kabupaten sehat Kabupaten Nunukan, agar lebih fokus melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan yang ada dilapangan terutama

pembinaan terhadap pasar sehingga ke depan Kabupaten Nunukan memiliki pasar sehat.

5. Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan program kabupaten sehat dapat melaksanakan upaya promotif dan preventif, seperti sosialisasi kegiatan yang berkait dengan kebersihan lingkungan, salah satunya menggiatkan kegiatan jumat bersih yang diprogramkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
6. Dinas Kesehatan agar bekerjasama dengan dinas lain supaya semua merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan kabupaten sehat.
7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diberi tanggungjawab untuk menjaga kebersihan tempat-tempat wisata sehingga dapat mendukung kebersihan lingkungan tempat wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Grindle, M. S. (1980). *Politik and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press: New Jersey.
- Handoko, T. H. (2000). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Huberman, A. M. dan Miles, M. B. (1994). *Data Management and Analisis Methods dalam Norman, K Denzin dan Lincoln Yvonna S (Eds), Handbook of Qualitative, Quantitative Research*. California: Sage Publication.
- Islamy, M. Irfan (1998). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Krismarti, dkk. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. MAPU 5301. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya Offset.
- Nurharjadmo, W. (2008). Evaluasi Implementai Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan. *Jurnal Spirit Publik*, Vol.IV. No. 2, 215-228/2008.
- Prasetya, I. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi* MAPU 5103. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Puswanto dan Kusri (1997). *Excellent Service*. Diklat Penjenjangan Manajer Madya. Jakarta: PT. Angkasa Pura II.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suryawati, R. (2006). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta). *Jurnal Spirit Publik*. Vol.II No. 2, 121-130/ 2006.
- Stewart, A. M. (2000). *Empowering People. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kanisius.
- Wibawa, S.(1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia
- Wahab, S. A. (2000). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.
- , 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.
- , 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.
- Tesis yang tidak dipublikasikan**
- Husain, M. (2011). Implementasi Perda No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Wakatobi. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Laud, Y. (2012). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Bersubsidi di Puskesmas Binjai Hulu Kabupaten Sintang. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Nusi, M. (2014). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo). Malang: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Brwijaya.
- Susanti, T. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Persalinan Studi Kasus di Puskesmas Depok III. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Wahyuni, S. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (Studi pada Puskesmas Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. Jakarta : Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.



Lampira 1 : Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan Tentang Tim Forum
Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Implementasi Kebijakan, Dengan Fenomena Yang Diamati Adalah :	
	Isi Kebijakan, meliputi	
	<p>Kepentingan yang dipengaruhi adanya program</p> <p>a) Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan</p> <p>b) Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program kabupaten sehat</p> <p>c) Apakah Forkahat dianggarkan oleh Pemda setiap tahun ?</p>	
	<p>Jenis Manfaat yang dihasilkan</p> <p>a) Apakah ada manfaat yang diterima oleh tim forkahat dengan disosialisasikannya program kabupaten sehat</p> <p>b) Manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan disosialisasikannya program kabupaten sehat</p> <p>c) Apa saja sasaran program kabupaten sehat melalui peningkatan pola hidup bersih dan sehat.</p>	
	<p>Jangkauan perubahan yang diinginkan</p> <p>a) Perubahan apa saja yang ingin dicapai dengan adanya program kabupaten sehat?</p> <p>b) Bagaimana tingkat kehadiran masyarakat disetiap pelaksanaan kegiatan tim Forkahat di lapangan ?</p> <p>c) Apakah pola hidup dari sisi kesehatan masyarakat sudah berubah ?</p>	
	<p>Apakah sebuah program sudah tepat</p> <p>a) Apakah program kegiatan kabupaten sehat di rencanakan setiap tahun?</p> <p>b) Apakah program kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat ?</p> <p>c) Apakah ada laporan pertanggungjawaban kegiatannya dari tim forkahat ?</p>	
	<p>Bagaimana keterlibatan tim forkahat sebagai pelaksana program</p> <p>a) Apa yang dilakukan oleh tim forkahat untuk mensukseskan program kabupaten sehat?</p> <p>b) Bagaimana strategi yang dijalankan oleh tim forkahaat dalam pelaksanaan program kabupaten sehat ?</p> <p>c) Bagaimana kapasitas dan kompetensi dari tim forkahat ?</p>	

	<p>Bagaimana fungsi tim forkahat sebagai pelaksana program</p> <p>d) Apa sumberdaya yang ada difungsikan dengan baik?</p> <p>e) Apakah SDM dalam tim forkahaat sudah memadai?</p> <p>f) Apakah Tugas dan Fungsi Forkahat di dalam SK Bupati Nunukan Nomor 188.45/423/VI/2012 sudah dilaksanakan oleh Tim Fokahat ?</p>	
2.	Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah :	
	<p>Intensitas sosialisasi Forkahat</p> <p>a) Berapa kali sosialisasi/pertemuan Forkahat dengan SKPD terkait per tahun ?</p> <p>b) Berapa kali sosialisasi/pertemuan Forkahat di tingkat kecamatan per tahun ?</p> <p>c) Berapa kali sosialisasi/pertemuan Forkahat di tingkat kelurahan/desa per tahun ?</p>	
	<p>Kejelasan komunikasi Forkahat dari para pelaksana</p> <p>a) Apakah Forkahat sudah dipahami pada tingkat OPD, Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat umum ?</p> <p>b) Materi apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi Forkahat ?</p> <p>c) Apakah ada laporan pertanggungjawaban kegiatannya ?</p>	
	<p>Konsistensi Pedoman Umum Forkahat</p> <p>a) Apakah ada pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan Forkahat ?</p> <p>b) Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan pedoman umum ?</p> <p>c) Bidang apa yang sampai saat ini belum bisa dijalankan ?</p>	
	Sumberdaya, adapun fenomena yang diamati adalah :	
	<p>Staf :</p> <p>a) Kemampuan Sumberdaya manusia pelaksana Forkahat</p> <p>b) Jumlah Sumberdaya manusia yang ada di Tim Forkahat ?</p>	
	<p>Informasi,</p> <p>a) Apa bentuk informasi yang bapak/ibu gunakan dalam rangka pelaksanaan forkahat ?</p> <p>b) Sumbernya dari mana ?</p>	
	<p>Wewenang,</p> <p>a) Apa yang mengatur kewenangan dari para pelaksana forkahat ?</p> <p>b) Bagaimana pelaksanaan wewenang tersebut ?</p>	
	<p>Fasilitas</p> <p>a) Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh Pemda ?</p>	

	b) Bagaimana biaya oprasionalnya ?	
3.	Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Forkahat di Kabupaten Nunukan ?	



Lampiran 2.Matriks Hasil Wawancara Dari Informan

No	Indikator/dimensi	Hasil wawancara yang telah direduksi
A	Isi Kebijakan (conteks of policy)	
1	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tim forkahat	<p>a. Informan 1: Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi program kabupaten sehat, hal ini terlihat semua masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan, sosialisasi dan pembinaan, meskipun masih terbatas dan tidak semua masyarakat dijangkau. Karena tujuan dari program dimaksud adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>b. Informan 9: Kalau berbicara kepentingan tidak ada karena semua masyarakat diperlakukan sama, jadi tidak ada kepentingan baik pribadi maupun politik</p> <p>c. Informan 8: Tidak ada kepentingan khusus, kami sebisa mungkin melakukan pembinaan dan menjangkau mereka khususnya kepada masyarakat yang yang kami anggap benar-benar membutuhkan bantuan</p> <p>d. Informan 5: Tidak ada, karena kita melihat keadaan masyarakat yang akan diberi bantuan berupa pemberdayaan apakah siap untuk bekerjasama dalam penyiapan bahan dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikankegiatan yang akan dikerjakan</p>
2	Manfaat apa yang dirasakan oleh dengan masyarakat disosialisasinya program kabupaten sehat melalui pengenalan pola hidup sehat dan bersih, pemberian bantuan dan pendampingan di lapangan?	<p>a. Informan 12: Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, dimana ada beberapa masyarakat di lingkungan kami yang diberikan bantuan berupa pemberdayaan pembuatan jamban keluarga. Memang mereka sangat terbantu karena masyarakat yang dulunya tidak punya jamban, sekarang sudah ada. Jadi program tersebut sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi masyarakat terutama dalam hal pemeliharaan kesehatan.</p> <p>b. Informan 15: Manfaatnya bahwa dengan adanya forum kabupaten sehat mereka sangat terbantu khususnya masyarakat yang tinggal dilingkungan yang kurang sehat.</p> <p>c. Informan 9: Mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yg ada, mereka dapat mengetahui tentang pola hidup yang seht</p>

		<p>d. Informan 6 : Program kabupaten sehat yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ini telah memberikan dampak yang cukup baik terutama dari sisi kesehatan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.</p> <p>e. Informan 13: sangat bermanfaat buat kami, apalagi kami sudah dibantu oleh tim forkabhat, jadi kami harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kami.</p>
		<p>f. Informan 15 : Kami sangat terbantu dengan program ini dimana telah memberikan manfaat yang besar bagi warga di RT kami terutama dengan adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan jamban keluarga. Warga yang dulunya tidak punya jamban sekarang sudah punya jamban sendiri dan tidak lagi buang air besar di sembarang tempat.</p>
3	<p>Derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah dengan dilaksanakannya program kabupaten sehat</p>	<p>a. Rsponden 4: Kami mengharapkan tercapainya kondisi Kabupaten Nunukan yang bersih, nyaman, aman dan sehat, sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki kondisi kesehatan yang baik dengan didukung lingkungan yang sehat karena masyarakat sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatan</p> <p>b. Rsponden 2 : Perubahan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan program forum kabupaten sehat di daerah ini adalah agar tercapai kondisi kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas serta perekonomian masyarakat</p> <p>c. Informan 7 :Program kabupaten sehat ini sangat baik karena dapat membawah perubahan terutama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah disembarang tempat dan buang air besar tidak pada tempatnya, dengan disosialisasikannya program kabupaten sehat ini, maka sebagian masyarakat sudah merubah kebiasaan tersebut sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dan derajat kesehatan dapat meningkat.</p>

		d. Rsponden 9 : Perubahannya yang saat ini kami harapkan adalah terciptanya suatu RT yang sehat, desa yang sehat, kecamatan yang sehat dan selanjutnya kabupaten yang sehat
4	Apakah program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kabupaten sehat sudah tepat ?	<p>a. Informan 6 : Prgoram kegitan yang dilaksanakan selama ini sudah tepat, namun harus lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat mengetahui dan menikmati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai</p> <p>b. Informan 8 : Program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan di rencanakan setiap tahun dan kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran, yaitu masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya menjaga kesehatan akan tetapi diharapkan semua unsur dapat mendukung program tersebut sehingga dapat terwujud apa yang ingin dicapai.</p> <p>c. Informan 4 : Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Nunukan dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai sekarang dan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat oleh tim forum kabupaten sehat yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua tim pembina kabupaten sehat Kabupaten Nunukan.</p>
		d. Informan 2: Ya, program kabupaten sehat sudah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan setiap tahun dan masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dari tim forum kabupaten sehat di buat setiap tahun dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan juga Dinas Kesehatan serta diperiksa oleh Inspektorat sebagai instansi pengawas di daerah
		e. Informan 9: Ya, Program kabupaten sehat direncanakan stiap tahun, program yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan lingkungan dan masyarakat dan setiap kegiatan yang dilaksanakan ada laporan pertanggungjawabannya.

5	<p>Bagaimana keterlibatan SDM tim forkahat sebagai pelaksana program di dalam mengimplementasikan program kabupaten sehat saat ini? dan apakah SDM yang ada juga sudah mengetahui dan memahami program ini dengan baik?</p>	<p>a. Informan 5 : Kami sudah memaksimalkan semua tim termasuk anggota tim disetiap bidang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing, namun kami akui kalau pekerjaan mereka belum maksimal karena keterbatasan biaya operasional sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat masih terbatas</p> <p>b. Informan 6 : Dalam menjalankan program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan ada beberapa strategi yang dilaksanakan, salah satunya yaitu melakukan pendekatan langsung kemasyarakat yang kami anggap perlu untuk diberi pemahaman tentang penting berperilaku hidup bersih dan sehat, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak mendapat hambatan akan tetapi kami tetap berusaha untuk tetap melaksanakan tugas kami.</p>
		<p>c. Informan 9 : Kegiatan yang telah direncanakan pada setiap tahunnya pada program kabupaten sehat, kami jalankan dengan baik walaupun sebagian anggota kami ada yang kurang aktif dikarenakan adanya kesibukan lain diluar, kami sebagai ketua bidang tidak bisa juga memaksakan kepada anggota kami untuk mengerjakan secara terus menerus pekerjaan yang ada kaitannya dengan program kabupaten sehat karena mereka juga ada pekerjaan lain</p>
		<p>d. Informan 11 : SDM yang ada sekarang sudah terlibat dalam kegiatan ini, namun sering berganti pejabat sehingga program yang sudah dijalankan kadang tidak dilaksanakan lagi karena berganti kebijakan lagi. Kemudian koordinasi antara anggota tim juga harus diperkuat bukan jalan sendiri-sendiri, misalnya saja dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan</p>
	<p>Strategi yang dijalankan dan kapasitas dan kompetensi dari tim forkahat dalam pelaksanaan program kabupaten sehat.</p>	<p>e. Informan 9 : Strategi yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dalam rangka terwujudnya Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten sehat</p> <p>f. Informan 11: Kalau sumber daya dari tim forkahat saya rasa sudah cukup, namun kedepannya perlu ada pelatihan untuk</p>

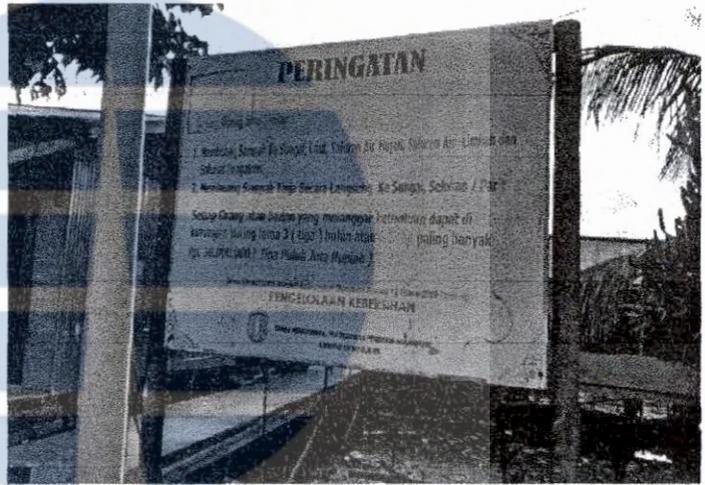
		<p>peningkatan kompetensi sdm terutama untuk pelatihan tentang tata kelola organisasi dan keuangan sehingga semua anggota tim tahu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.</p>
6	Apakah sumberdaya yang ada difungsikan dengan baik?	<p>a. Informan 10: Sumberdaya yang ada dalam tim forum kabupaten sehat sudah difungsikan secara maksimal, walaupun masih ada beberapa anggota tim yang belum bisa bekerja secara maksimal namun kami tetap berusaha mendorong agar semua anggota tim dapat aktif bekerja demi suksesnya program kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan.</p>
	Apakah SDM dalam tim forkahat sudah memadai dan apakah tugas dan fungsi tim sudah dilaksanakan	<p>b. Respondn 2 : Sumberdaya manusia yang ada di tim form kabupaten sehat, sudah memadai karena sebagian besar anggotanya berasal dari berbagai golongan dan tingkt pendidikan dari berbagai jenjang. Kedepannya diperlukan peningkatan SDM agar program dan kegiatan dari forum kabupaten sehat lebih inovatif dan lebih bermanfaat buat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan dari tugas dan fungsi tim forkahat sudah dijalankan, namun secara keseluruhan belum maksimal karena masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, seperti sulitnya merubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal kegiatan kerjabakti atau gotong royong jumat bersih yang biasa dilaksanakan</p>
		<p>c. Informan 10: Selama ini semua tim forum kabupaten sehat sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan nomor : 188.45/423/VI/2012 dan semua ketua bidang wajib mengontrol pekerjaan anggotanya dan tetap harus bekerjasama dengan lintas bidang yang ada dalam tim forum kabupaten sehat, sehingga program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik</p>
		<p>d. Informan 12 : Kalau menurut saya khusus yg berkaitan dengan masalah jumlah SDM sudah memadai namun kompetensinya yang masih kurang. Jadi Jelas perlu adanya peningkatan kompetensi SDM apalagi kami sering menjadi Narasumber maka kami perlu mendapat diklat untuk mempertajam kemampuan kami.</p>

B	Komunikasi	
1	Bagaimana Intensitas pelaksanaan sosialisasi oleh tim forkahat	<p>a. Informan 9 : Pelaksanaan sosialisasi/pertemuan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi terkait seperti dinas/kantor dalam tahun 2017 ini tidak pernah di laksanakan karena tidak ada anggaran sosialisasi yang sediakan. Demikian pula di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak pernah dilaksanakan.</p> <p>b. Informan 2 : Untuk mensukseskan program kabupaten sehat di Kabupten Nunukan, maka salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi berupa tatap muka langsung dengan masyarakat dan juga dengan organisasi perangkat daerah melalui pertemuan yang diadakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa bahkan dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa ketua RT sebagai pengurus forum kabupaten sehat dengan tujuan agar forum kabupaten sehat dapat dipahami secara luas.</p> <p>c. Informan 5: Program kabupaten sehat sudah kami sosialisasikan dengan anak sekolah, pemuda, masyarakat dan dinas/instansi baik di kabupaten maupun di kecamatan. Sosialisasi ini sudah direncanakan minimal 3 dalam satu tahun, akan tetapi kadang hanya terealisasi 1 kali dan yang di luar pulau Nunukan tidak bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran, sedangkan untuk di wilayah pulau Nunukan, seperti Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan masih bisa kami laksanakan sosialisasi 1 kali dalam satu tahun karena tidak membutuh biaya yang terlalu besar.</p> <p>d. Informan 4 : Sosialisasi/pertemuan yang diadakan baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sudah sesuai yang diharapkan, namun masih ada beberapa organisasi perangkat daerah belum memahami apa itu forum kabupaten sehat dan apa fungsi dan kegunaannya, sehingga diharapkan tim forum kabupaten sehat dapat mengetahui OPD mana yang belum paham dan perlu diadakan pertemuan.</p>
3	Faktor-faktor penghambat	<p>a. Informan 2 : yang menghambat pelaksanaan program adalah luas wilayah Kabupaten</p>

	<p>implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat</p>	<p>Nunukan yang sangat besar, sehingga dalam menjangkau pada daerah-daerah tertentu memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, perilaku masyarakat yang masih sulit untuk dirubah terutama dalam hal kegiatan kerjabakti atau gotong royong.</p> <p>b. Informan 3 : yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kabupaten sehat adalah ada masih adanya beberapa kalangan yang beranggapan bahwa kabupaten sehat adalah milik Dinas Kesehatan atau pihak yang bergerak dalam bidang kesehatan dikarenakan terdapat kata sehat, padahal jika dipahami secara mendalam pedoman penyenggaraan kabupaten sehat, maka dapat memberikan gambaran pemahaman bahwa program kabupaten sehat harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan beberapa dinas/kantor teknis yang terkait, pihak swasta dan masyarakat.</p> <p>c. Informan 9 : Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah minimnya dana kegiatan yang diberikan kepada setiap bidang sehingga rencana kerja yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan semua, misalnya kami rencanakan 3 kegiatan kan tetapi yang dapat terealisasi hanya 1 saj. Selanjutnya dikatakan bahwa dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada. Pada tahun 2017 ini bidang kami hanya diberi dana Rp 3.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Informan 10 : Kompetensi SDM tim forkahat yang masih rendah karena selama menjadi anggota tim belum pernah diberi pelatihan, seperti pelatihan tentang tata kelola organisasi, keuangan dan penyusunan laporan kegiatan yang sesuai aturan.</p> <p>e. Informan 5 : Sekretariat FKD di tingkat kecamatan belum ada tersendiri, sejak terbentuknya sampai sekarang masih menumpang di kantor camat, sehingga pekerjaan tim belum maksimal, lebih lanjut dikatakan bahwa kita ketahui semua peran sekretariat sangat besar karena merupakan tempat untuk menyusun program kerja, tempat berdiskusi untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat kecamatan</p>
--	---	---

4.	Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Nunukan	<p>a. Informan 2 : Adanya dukungan dana dan program dari pemerintah daerah, kerjasama dan keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang cukup baik dan adanya dukungan dari pihak TNI dan Polri dalam beberapa program dan event.</p> <p>b. Informan 3 : Adanya dukungan dana dari pemerintah daerah setiap tahun baik melalui kegiatan yang ada di kantor Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan maupun dana hibah yang langsung di kelolah oleh tim forum kabupaten sehat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejak terbentuknya forum tersebut pada Tahun 2012 sudah 2 (kali) mendapat dana hibah.</p> <p>c. Informan 8: Masih besarnya respon masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang kami laksanakan sehingga memudahkan kami dalam menjalankan kegiatan kami, contohnya dalam hal pembuatan jamban keluarga dari ban bekas, antusias masyarakat sangat besar, mereka bersedia menyiapkan bahan dan kami hanya mengajari teknik dan cara-cara pembuatan jamban tersebut.</p> <p>d. Informan 10: Jumlah SDM tim forkahat yang ada saat ini sudah memadai dan berasal dari tingkat pendidikan yang beragam dan besar dari unsur pemerintah, swasta, LSM, tokoh masyarakat dan ketua RT.</p> <p>e. Reponden 5: Adanya dana dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan program kegiatan di tingkat kecamatan walaupun masih sangat minim. Untuk Tahun 2017 ini setiap Forum Komunikasi Desa (FKD) di tingkat kecamatan diberikan dana sebesar Rp 4.000.000,- untuk mendanai program kegiatan yang dilaksanakan.</p>
----	---	---

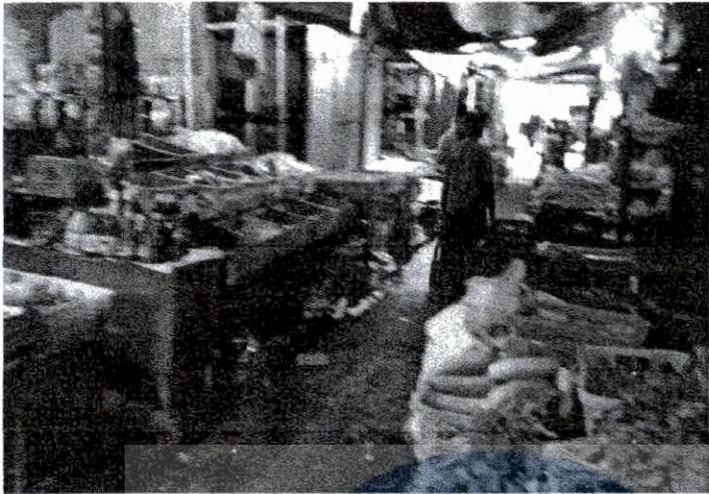
Lampiran 3. Foto Lingkungan Sekitar Sungai



Lampiran 4. Foto Lingkungan Pemukiman Masyarakat



Lampiran 5. Foto Lingkungan Pasar



Lampiran 6. Foto Pelaksanaan Kegiatan Forkahat

